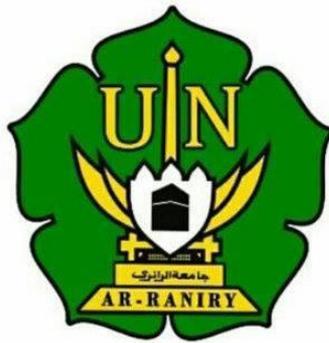


**DAMPAK KEBIJAKAN PPKM TERHADAP PELAKU USAHA CAFE  
DI KAWASAN REKREASI MON IKEU LHOKNGA ACEH BESAR**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ILHAM AKBAR**

**NIM. 180801023**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Akbar  
NIM : 180801023  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Dampak Kebijakan PPKM Terhadap Pelaku Usaha Café  
Di Kawasan Rekreasi Mon Iku Lhoknga Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Ilham Akbar

**DAMPAK KEBIJAKAN PPKM TERHADAP PELAKU USAHA CAFE  
DIKAWASAN REKREASI MON IKEU LHOKNGA ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

Diaju

kan Kepada Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Pemerintahan  
Uin Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

**ILHAM AKBAR**

**NIM. 180801023**

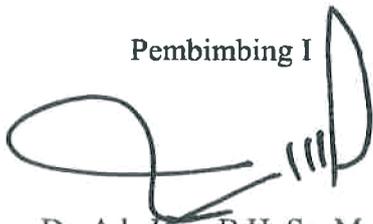
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

جامعة الرانيري

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Ade Irma, B.H., Sc., M.A.  
Nip.19730921000032004

Pembimbing II



Renaldi Safriansyah, M.H.Sc., M.P.M.  
Nip.197901072023211003

**DAMPAK KEBIJAKAN PPKM TERHADAP PELAKU USAHA CAFE  
DI KAWASAN REKREASI MON IKEU LHOKNGA ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

**Ilham Akbar**

**NIM. 180801023**

Pada Hari/Tanggal: Senin, 11 Desember 2023

27 Jumadil Awal 1445 H

Darussalam-Banda Aceh,

Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ade Irma, BzH.Sc., M.A.

NIP. 19730921000032004

Renaldi Safriansyah, M.H.Sc., M.P.M.

NIP. 197901072023211003

Penguji I,

Penguji II,

Ramzi Murzidin, S.H.I., M.A.

NIP. 198605132019031006

Arif Akbar, M.A.

NIP. 199110242022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Muji Mulia, M.Ag.

NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Pemberlakuan kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid berdampak pada segala sektor. Salah satu sektor yang sangat berpengaruh adalah sektor perekonomian usaha cafe dikawasan rekreasi Mon Iku Lhoknga Aceh Besar. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan PPKM terhadap perekonomian pelaku usaha cafe yang berada dikawasan rekreasi Mon Iku Lhoknga Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan subjek dipilih berdasarkan jenis pekerjaan yaitu pemilik usaha cafe. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan penerapan PPKM yang dirasakan oleh para pelaku usaha adalah terbatasnya operasional usaha, dimana pemilik café dilarang membuka usaha mereka. Hal ini mengakibatkan merosotnya pendapatan usaha dan pelaku usaha harus merumahkan para pekerja selama penerapan PPKM. Strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengatasi kendala tersebut salah satunya dengan menerapkan penjualan teknik take away dan memanfaatkan media social sebagai media promosi usahanya.

Kata Kunci: Kebijakan PPKM, Usaha Cafe



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak Kebijakan PPPKM Terhadap Pelaku Usaha Cafe Dikawasan Rekreasi Mon Ikeu Lhoknga Aceh Besar” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah shalallahu'alaihiwasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang Tua Tercinta dan Keluarga Besar yang telah mendoakan dan menyemangati, baik dari segi material maupun nonmaterial.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.

5. Rizkika Lhena Darwin M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ade Irma, B.H.Sc.,M.A selaku pembimbing I dan Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis dan semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua. Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 11 Desember 2023

Yang Menyatakan,

Ilham Akbar

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Penelitian Terdahulu .....	8
1.6 Definisi Operasional.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Kebijakan Publik .....	15
2.1.1 Teori dan Proses Kebijakan Publik.....	16
2.1.2 Permasalahan Kebijakan Publik .....	18
2.2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) .....	21
2.4.1 Penerapan Kebijakan PPKM .....	23
2.4.2 Kebijakan PPKM di wilayah Aceh.....	25
2.3 Usaha Cafe .....	28
2.5.1 Pengertian Usaha .....	28
2.5.2 Pengertian Usaha Cafe.....	29
2.5.3 Peran Usaha Cafe .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	32
3.2 Subjek Penelitian.....	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.3.1 Wawancara.....	34
3.3.2 Dokumentasi .....	34
3.3.3 Observasi.....	34
3.4 Teknik Analisis Data .....	35
3.4.1 Pengumpulan Data.....	35
3.4.2 Reduksi Data .....	36
3.4.3 Penyajian Data .....	36
3.4.4 Menarik Kesimpulan .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	37
4.1.1 Letak Geografis.....	37
4.2 Hambatan Penerapan PPKM Bagi Pelaku Usaha Cafe.....	42

4.3 Dampak Penerapan PPKM Terhadap Kondisi Perekonomian Usaha Cafe Dikawasan Rekreasi Lhoknga Aceh Besar .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71
<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan publik pada umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari keterlibatan yang mencakup dalam kata politis, yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun kebijakan public merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Melihat fungsi dari filsafat kebijakan, partisipasi masyarakat wajib dalam penyusunan kebijakan di sebuah negara demokrasi. Dalam konteks otonomi daerah pun, partisipasi masyarakat dijamin melalui Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 45 disebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai kewenangan menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pasal 139 menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Dijaminnya kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam penyusunan seperti kebijakan publik di daerah, agar kebijakan publik memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan kontroversi

di masyarakat. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik dimulai dari dan oleh rakyat, serta untuk rakyat, terutama di sebuah negara demokrasi

Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan secara bersama. Kebijakan pemerintah pada umumnya ditujukan untuk publik (negara, masyarakat, dan kepentingan umum) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik.

Pada akhir tahun 2019, seluruh dunia dilanda oleh sebuah virus yang kemudian mewabah yang dikenal sebagai pandemi covid-19, keadaan pandemi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengantisipasi penularan virus salah satunya adalah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Kebijakan yang pernah dilakukan pemerintah pada era pandemi Covid-19 adalah dengan memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini dimaksudkan agar memperkecil peluang penyebaran virus Covid-19 di masyarakat. Kebijakan ini dibuat untuk membatasi secara besar-besaran aktivitas warga selama pandemi virus corona agar tingkat penularan bisa berkurang. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tentunya merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). Berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2020, arti dari Pemberlakuan pembatasan

kegiatan masyarakat adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid 19.<sup>1</sup>

Penerapan berbagai kebijakan pemerintah sangat berkaitan dengan berbagai bidang, salah satunya dibidang perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh masyarakat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Dalam memahami ekonomi dan perekonomian, kita harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya arti dari istilah ekonomi.

Istilah perekonomian masyarakat sering diidentikkan dengan pembangunan pertanian. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat (terutama di Negara berkembang) mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Indikator perekonomian masyarakat diantaranya infrastruktur yang baik, fasilitas umum yang memadai, aspek informasi, kualitas sumberdaya masyarakat yang unggul, dan pendapatan penduduk.

Hal pertama yang menjadi indikator perekonomian masyarakat adalah di lihat dari infrastruktur pedesaan itu sendiri terutamanya di akses jalandi sekitar desa. Ada beberapa desa yang memiliki jalan mudah di lalui berbagai macam kendaraan namun ada pula desa yang memiliki akses jalan buruk dan sulit dilalui

---

<sup>1</sup> Mawar, Dkk. (2021). *Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia*. Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ.

kendaraankendaraan besar sehingga bisa menghambat bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Selanjutnya, Fasilitas umum yang memadai juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat. Tentunya harus di dukung pula dengan fasilitas yang memadai dari desa tersebut. Fasilitas ini menunjang segala aspek kehidupan masyarakat atau penduduk desa agar semakin maju. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan itu antara lain fasilitas pasar yang memadai, sekolahan, puskesmas dan lain sebagainya.

Salah satu pendukung perkembangan perekonomian masyarakat adalah informasi. Akses informasi yang baik bisa memajukan perekonomian masyarakat, karena dengan hal ini bisa belajar dari masyarakat desa lainnya atau bahkan perkotaan. Sehingga apa yang sudah berhasil di tempatkan di wilayah lain bisa dicoba di desa tersebut.

Indikator keberhasilan yang selanjutnya dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Apakah sumber daya manusia tersebut unggul atau kurang, contohnya dari tingkat pendidikan atau pun pekerjaan. Desa yang sudah maju cenderung memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Sedangkan desa yang kurang maju bahkan terbelakang memiliki penduduk yang belum mengetahui pentingnya pendidikan. Indikator pembangunan perekonomian masyarakat yang terakhir adalah dari pendapatan penduduk itu sendiri, apakah pendapatan sudah sesuai atau pun masih jauh di bawah rata-rata.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Adiputra, M. A. (2021). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Condro Kecamatan Pasiriankabupaten Lumajang*.

Penerapan kebijakan PPKM berdampak pada bidang perekonomian, kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat karena dirasa sangat merugikan keadaan perekonomian sebagaimana kelompok masyarakat. Selama masa PPKM Pemerintah membatasi aktivitas penduduk. Pengetatan mobilitas juga berlaku untuk perkantoran, entitas usaha non-sektor esensial, dan kritikal diwajibkan memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah untuk seratus persen pegawai. Sedangkan sektor esensial dibatasi dengan kapasitas maksimal lima puluh persen. Serta ada tambahan bagi daerah dengan level assesmen 3 dan 4 di Jawa dan Bali terkait target testing, tracing, dan treatment (3T). Selain itu, adanya pengaturan perjalanan dalam penggunaan semua moda transportasi. Pelaku perjalanan baik untuk dinas maupun distribusi barang diwajibkan membawa surat vaksinasi minimal dosis pertama dan hasil tes swab PCR maupun tes antigen yang menunjukkan hasil negatif COVID-19. Bahkan untuk penumpang pesawat, penumpang wajib membawa hasil tes swab PCR 2 x 24 jam. Hal ini untuk mengurangi mobilitas perjalanan antar kota antar provinsi.<sup>3</sup>

Selain wilayah Jawa dan Bali, wilayah lain juga turut menerapkan program kebijakan PPKM salah satunya adalah provinsi Aceh. Kebijakan aturan yang diterapkan di Aceh terdapat tiga (3) bidang yaitu pada bidang kesehatan, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

---

<sup>3</sup> Nuraeny R., Dkk. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Pengaruh terhadap ketahanan Keluarga Pedangang di Kebumen. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2 (9), 1627-1639.

Dalam bidang kesehatan gubernur menginstruksikan agar vaksinasi diberikan secara bertahap kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19. Dalam bidang perindustrian dan perdagangan, gubernur meminta agar adanya penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang lebih ketat di tempat usaha dan membatasi jam operasional untuk warung kopi/cafe, pusat perbelanjaan dan sejenisnya sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Pembatasan ini jelas merugikan sebagian kelompok masyarakat terutama yang pekerjaannya dibidang usaha kecil seperti usaha pedagang makanan atau minuman yang ada disekitar tempat wisata. Hal ini dikarenakan berkurangnya pengunjung yang mengunjungi tempat wisata pada masa PPKM, keadaan ini terlihat pada salah satu kawasan wisata yang ada di Aceh yaitu kawasan wisata Pantai Lhoknga, sebelum pandemi melanda wilayah tersebut terkenal dengan area wisata yang juga di dukung dengan adanya perdagangan usaha kecil yang berada di pinggiran pantai yang menyajikan berbagai makanan dan minuman untuk di nikmati oleh para pengunjung tempat wisata, namun pada saat pandemi terjadi dan di berlakukannya PPKM perekonomian pada pelaku usaha kecil yang berada di daerah tersebut terlihat sepi, hal ini jelas mengganggu perekonomian pelaku usaha kecil yang berada di daerah wisata tersebut.

Permasalahan yang muncul akibat kegiatan PPKM ini juga terjadi pada masyarakat di Kawasan Lhoknga Aceh Besar. Wilayah tersebut merupakan salah satu area tempat wisata yang ada di provinsi Aceh. Wilayah ini terdapat banyak masyarakat yang memiliki usaha mikro dalam bidang perdagangan yaitu pelaku usaha yang berjualan di pesisir pantai.

Dalam hal ini menjadikan usaha mikro tersebut sebagai sumber utama perekonomian sebagian masyarakat di wilayah itu. Penerapan kebijakan PPKM tentu diraskan langsung oleh pelaku usaha dimana terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang menjadikan usaha mereka tidak berjalan optimal sehingga berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat terutama pelaku usaha mikro.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Dampak Kebijakan PPKM terhadap Pelaku Usaha Cafe Dikawasan Rekreasi Mon Ikeu Lhoknga Aceh Besar.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak penerapan PPKM terhadap kondisi usaha cafe di Kawasan rekreasi Mon Ikeu Lhoknga Aceh Besar?
2. Apa saja hambatan penerapan PPKM bagi pelaku usaha cafe di Kawasan rekreasi Mon Ikeu Lhoknga Aceh Besar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dampak penerapan kebijakan PPKM terhadap pelaku usaha cafe yang berada di kawasan rekreasi Mon Ikeu Lhoknga Aceh Besar.
2. Mengetahui hambatan penerapan kebijakan PPKM terhadap pelaku usaha cafe yang berada di kawasan rekreasi Mon Ikeu Lhoknga Aceh Besar.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat atau pihak yang akan melakukan penelitian di dalam ruang lingkup yang sama di masa yang akan datang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengembangan ilmu pengetahuan yang dikaji.

#### 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh kebijakan PPKM terhadap perekonomian masyarakat sudah ada yang melakukan penelitian ini, Oleh sebab itu perlu kiranya memahami persamaan dan perbedaan hasil dari penelitian tersebut. Maka peneliti menjelaskan terlebih dahulu terkait relevansi tulisan ini dengan penelitian terdahulu agar mudah menguraikan perspektif peneliti, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Marwiyah dkk yang berjudul: “Evaluasi kebijakan PPKM level 4 dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat di kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan evaluasi kebijakan PPKM level 4 dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian menunjukkan banyak masyarakat yang juga tidak senang dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena dampaknya membuat pemerosotan perekonomian bagi masyarakat Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo Jawa Timur, yang menaruh pendapatan mereka dari hasil penjualan daerah tersebut. Hal ini yang membuat masyarakat tertarik untuk membelinya terlebih lagi daerah bundaran glaser merupakan suatu Ikon Kota Probolinggo yang ramai dikunjungi oleh masyarakat sehingga juga berdampak juga bagi para pedagang yang menggelar lapak disana yang juga diuntungkan dengan adanya keramaian. Sebenarnya dampak dari kebijakan PPKM Level 4 yang diterapkan sejak tanggal 6 Juli 2021 yang selalu diperpanjang memang mempengaruhi perekonomian bagi seluruh elemen masyarakat termasuk yang mempertaruhkan pendapatan mereka dari hasil perdagangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawar dkk yang berjudul “Dampak sosial ekonomi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sosial ekonomi dari penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Adapun metode kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi literatur.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai upaya menanggulangi semakin meluasnya penyebaran virus covid 19 ternyata berdampak sangat luas. Upaya mengurangi pergerakan manusia untuk mencegah kontak melalui social distancing dan physical distancing realitasnya membawa dampak

yang besar dalam aspek sosial dan ekonomi. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi. Kebijakan PPKM juga telah memberi dampak dalam interaksi hubungan sosial. Pembatasan aktivitas dan interaksi antar manusia menjadi persoalan sosial karena kejenuhan dan kebosanan yang melanda selama mengikuti ketentuan harus di rumah saja.

Penelitian yang dilakukan oleh June Trivelline Krey yang berjudul: “Penerapan Kebijakan PPKM dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil di Kota Jayapura”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dampak dari adanya pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) terhadap pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori kebijakan oleh Edward III. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (9 informan), dokumentasi dan observasi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak PPKM terhadap pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jayapura sudah terlaksana dengan baik, karena masyarakat Kota Jayapura dan juga pelaku usaha mentaati dan mengikuti kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan pemerintah untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi serta memutuskan rantai penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura. Meskipun penerapan kebijakan PPKM itu membawa dampak positif bagi pemerintah dalam mengurangi dan memutuskan rantai penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura. Namun dengan adanya penerapan

kebijakan PPKM ini juga membawa dampak negatif bagi masyarakat terutama bagi para pelaku usaha karena pendapatan mereka yang berkurang dari pendapatan yang sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Periyadi dkk yang berjudul: “Dampak Pandemi Covid-19 Dan Kebijakan PPKM Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Wilayah Banjarbaru Kalimantan Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya Dampak pengaruh Covid-19 dan Kebijakan PPKM terhadap tingkat pendapatan pelaku usaha UKM di wilayah Kota Banjarbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu suatu model penelitian yang mengharuskan akan adanya perhitungan angka-angka, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejak adanya wabah ini perekonomian tidak terkendali dan menurun. Namun, diharapkan UMKM ini bisa bangkit dan tetap kokoh menopang perekonomian Indonesia terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota banjarbaru. Sebagai pelaku usaha tidak ada yang mau mengalami kerugian yang lumayan besar. Namun di sisi lain, dengan keadaan seperti ini pelaku usaha mau tidak mau harus bersahabat. Serta memikirkan strategi tanpa melupakan anjuran dari pemerintah, seperti melakukan kegiatan apapun harus mematuhi protokol kesehatan, agar bisa meningkatkan pendapatan meskipun dengan keadaan dan situasi yang baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Ayu Safitr, dkk, yang berjudul: “Analisis Kebijakan Pemberlakuan PPKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Industri Skala Kecil dan Menengah Makanan dan Minuman”. Tujuan dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pandemi Covid-19 dan adanya pemberlakuan PPKM terhadap industri skala kecil dan menengah kaki lima di Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif dengan pendekatan penulisan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap para pemilik UMKM, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari beberapa sumber referensi yang valid. Data yang diperoleh disajikan secara menyeluruh, dikategorikan, dijabarkan dan diinterpretasikan agar dapat ditemukan kesimpulan yang menyeluruh analisis tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan Penelitian ini menekankan pada analisis pengaruh Covid-19 terhadap UMKM kaki lima di Sleman Yogyakarta pada masa PPKM. Eksplorasi literatur secara kolektif digunakan untuk mengidentifikasi akibat yang dihadapi oleh para pemilik UMKM terhadap pandemi Covid-19. Temuan dan analisis yang didukung oleh literatur-literatur menunjukkan bahwa Covid-19 menimbulkan permasalahan yang pelik bagi UMKM di Sleman, Yogyakarta. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya pasokan bahan baku, penurunan penjualan, terbatasnya transportasi, operasional terbatas, dan pembatasan aktivitas.

Dari beberapa penelitian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pemberlakuan PPKM berdampak terhadap pelaku usaha dimana para pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan dari hasil penjualan yang berdampak pada kondisi ekonomi para pelaku usaha. Dimana para pelaku usaha kesulitan dalam pemasokan barang untuk penjualan dan juga terjadinya pembatasan aktivitas usahanya.

## 1.6 Definisi Operasional

### 1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang. Pengaruh juga dapat di artikan yaitu pengaruh adalah suatu reaksi yang timbul (dapat berupa tindakan atau keadaan) dari sesuatu perlakuan akibat dorongan untuk mengubah atau membentuk suatu keadaan kearah yang berbeda.

### 2. Kebijakan PPKM

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang disebut PPKM adalah salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi pandemi Covid-19 yang sebelumnya pemerintah sempat memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di beberapa wilayah Indonesia.

Kebijakan aturan yang diterapkan di Aceh terdapat tiga (3) bidang yaitu pada bidang kesehatan, bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Dalam bidang kesehatan gubernur menginstruksikan agar vaksinasi diberikan secara bertahap kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19.

Dalam bidang perindustrian dan perdagangan, gubernur meminta agar adanya penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang lebih ketat di tempat usaha dan membatasi jam operasional untuk warung kopi/caffe, pusat perbelanjaan dan sejenisnya sampai dengan pukul 22.00 WIB.

### 3. Usaha Cafe

Usaha cafe adalah tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang dimana pengunjung dapat memesan minuman dan makanan yang tersedia pada setiap cafe. Cafe termasuk tipe restoran namun lebih mengutamakan suasana rileks, hiburan dan kenyamanan pengunjung sehingga menyediakan tempat untuk nongkrong yang nyaman dan alunan musik santai agar para tamu lebih betah dan lebih lama menghabiskan waktu di cafe. Umumnya masyarakat yang berusia 15-29 tahun merupakan usia produktif sehingga memerlukan tempat untuk bersantai, bersosialisasi, bertemu rekan kerja dan berkumpul bersama teman.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas kegiatan program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan.

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Menurut Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Menurut Amara Raksasataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu strategi yang disusun dan dijalankan oleh suatu individu, kelompok, pemerintahan, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah.

### **2.1.1 Teori dan Proses Kebijakan Publik**

Teori dan proses kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya menekankan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Perhatian para ilmuwan politik terhadap studi kebijakan publik juga semakin besar. Menurut James Anderson, adalah sah bagi seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah ataupun

pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu memecahkan persoalan dengan baik.

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik apabila konsep ini diperinci menjadi beberapa kategori, antara lain tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan. Dengan mengacu pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan Jones dan beberapa ahli lainnya, domain kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan penilaian kebijakan.

Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan serta deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan, dapat dianalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan tertentu. Adapun anjuran kebijakan secara khusus berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi atau aktivitas politik.

Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik. Pertama, fokus utamanya adalah penjelasan kebijakan, bukan anjuran kebijakan yang “pantas”. Kedua, sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan

publik dan pembentukannya sehingga dapat diterapkan di lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Analisis kebijakan publik sangat berguna dalam merumuskan ataupun mengimplementasikan kebijakan publik. Teori-teori dalam analisis kebijakan publik pada akhirnya dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan publik yang baik pada masa yang akan datang.

### **2.1.2 Permasalahan Kebijakan Publik**

Masalah didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang, yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Sementara itu, suatu masalah akan menjadi masalah publik jika melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat tidak hanya pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang yang secara tidak langsung terlibat.

#### **a. Masalah-masalah Publik**

Suatu masalah akan menjadi masalah publik apabila ada orang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Suatu masalah akan menjadi masalah publik jika masalah tersebut diartikulasikan. Masalah-masalah publik adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak luas dan mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat.

Masalah-masalah publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama, menurut Theodore J. Lowi, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah prosedural dan masalah substantif.

Masalah prosedural berhubungan dengan cara pemerintah diorganisasikan dan cara pemerintah melakukan tugas-tugasnya, sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia. Kategori kedua, didasarkan pada asal-usul masalah. Berdasarkan kategori ini, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah luar negeri dan masalah dalam negeri.

Lowi menyatakan bahwa masalah publik juga dapat dibedakan berdasarkan kategori jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungannya antara satu dengan yang lain. Berdasarkan kategori ini, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah distributif, masalah regulasi, dan masalah redistributif.

Masalah distributif mencakup sejumlah kecil orang dan dapat ditanggulangi satu per satu, sedangkan masalah regulasi mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan-tindakan pihak lain. Adapun masalah redistributif menyangkut masalah yang menghendaki perubahan sumber-sumber antarkelompok atau kelas dalam masyarakat. Kebijakan ini berawal dari konflik dan melibatkan konflik kelas.

#### **b. Ciri Pokok Masalah Kebijakan**

William Dunn dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik mengemukakan empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Saling kebergantungan. Seperti yang dinyatakan oleh Ackoff, masalah-masalah kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.
- 2) Subjektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.

- 3) Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.
- 4) Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

### c. Tipe-tipe Masalah Kebijakan

Charles O. Jones membuat dua tipe masalah publik, yaitu sebagai berikut.

- 1) Masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan.
- 2) Masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual, tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapatkan dukungan<sup>5</sup>

Proses kebijakan publik memiliki sejumlah tahapan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap proses pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik mempunyai hubungan erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan Masyarakat yang berkemungkinan terhadap kebijakan tersebut. Adapun tahapan pembuatan kebijakan public yaitu :

- 1) Identifikasi masalah dan kebutuhan yaitu mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami Masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan Masyarakat yang belum terpenuhi.
- 2) Analisis masalah dan kebutuhan yaitu mengolah, memilah, dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan Masyarakat yang kemudian dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan terorganisasi.

---

<sup>5</sup> Dr. Sahya Anggara, M.Si. *Kebijakan Publik*, ( Bandung : CV. Pustaka Setia, 2018), hal 24-27

- 3) Penginformasian rencana kebijakan yaitu dari laporan hasil analisis kemudian disusun rencana kebijakan. Rencana kebijakan disampaikan kepada berbagai sub sistem Masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan social untuk memperoleh masukan dan tanggapan.

## **2.2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**

Kebijakan yang pernah dilakukan pemerintah pada era pandemi Covid-19 adalah dengan memberlakukan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini dimaksudkan agar memperkecil peluang penyebaran virus Covid-19 di masyarakat. Kebijakan ini dibuat untuk membatasi secara besar-besaran aktivitas warga selama pandemi virus corona agar tingkat penularan bisa berkurang. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tentunya merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). Berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2020, arti dari Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid 19.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RepublicIndonesia, <https://www.ekon.go.id> (Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan di Indonesia mulai bulan Januari 2021. Tujuan dari pemberlakuan PPKM adalah untuk mengendalikan laju Covid-19. PPKM tahap pertama diberlakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 yang diberlakukan pada tahap awal untuk wilayah pulau jawa dan bali. Sebelum pemberlakuan PPKM ini ditahun sebelumnya yaitu ditahun 2020 pemerintah sudah memberlakukan adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang tujuannya juga sama yaitu mencegah adanya perluasan penyebaran Covid-19. Meskipun pemberlakuan PSBB saat itu belum dapat mencegah adanya penyebaran Covid-19 secara maksimal. Sehingga ditahun 2021 pemerintah meninjau ulang dan akhirnya menerapkan adanya PPKM.

PPKM Mikro bukan pelarangan kegiatan tetapi pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan beberapa kegiatan masyarakat dengan tujuan agar kegiatan tersebut tidak menjadi klaster baru dan sumber penyebab terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19 sampai pada tingkat kelurahan/desa di seluruh Indonesia.

Untuk mengoptimalkan pembatasan penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro. Istilah yang digunakan adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro atau PPKM mikro.

Aturan yang diberlakukan dalam PPKM Mikro didasarkan pada zonasi Covid-19 suatu daerah, apakah masuk zona hijau, kuning, oranye, atau merah. Pada zona merah, PPKM dilakukan hingga tingkat RT.<sup>7</sup>

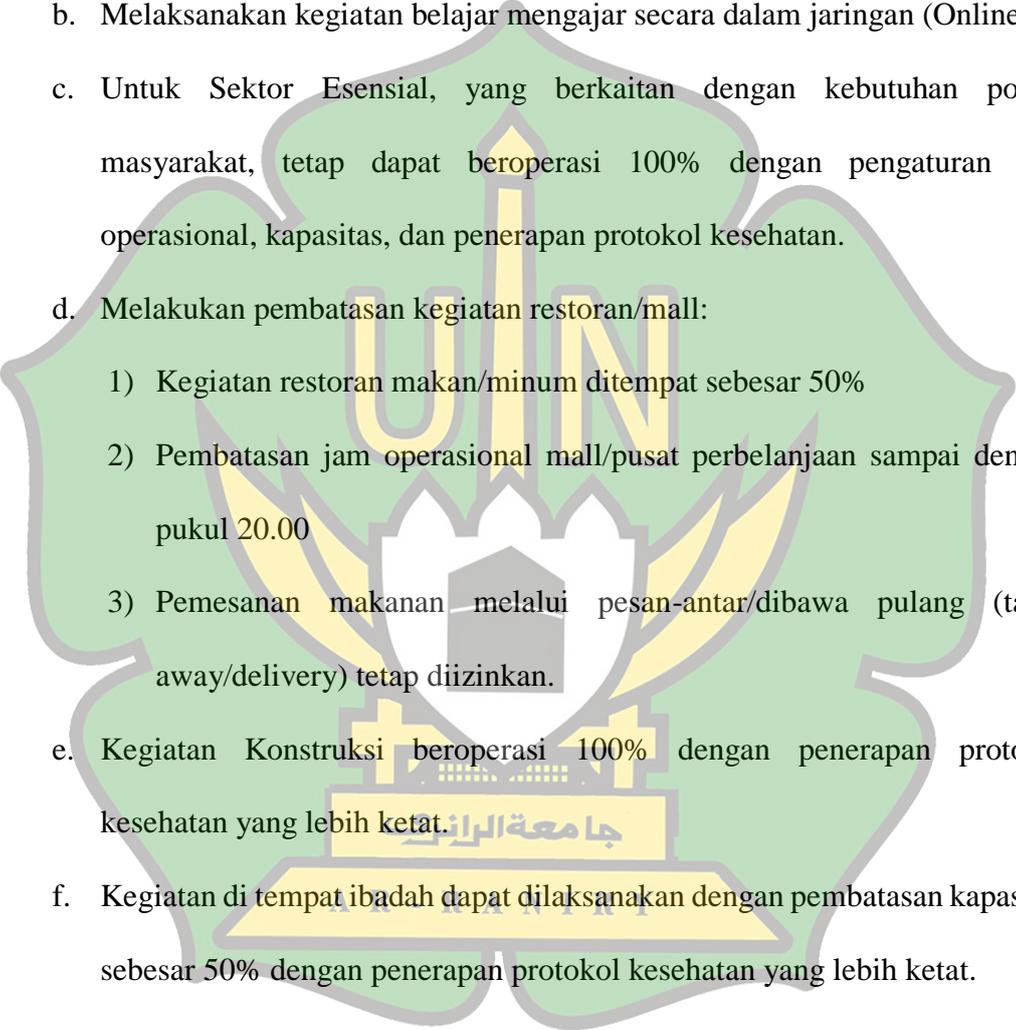
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Fadzri Munir dampak negatif dari kebijakan ppkm adalah menurunnya pendapatan para pelaku usaha, sektor kuliner merupakan sektor terparah dari adanya dampak tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan-pembatasan tersebut secara tidak langsung berimbas pada kelangsungan dunia usaha.

#### **2.4.1 Penerapan Kebijakan PPKM**

Penerapan PPKM Mikro dilaksanakan oleh Pos Jaga Desa/Kelurahan yang berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta koordinasi dengan TNI dan Polri. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan monitoring serta pengawasan yang akan dikoordinasikan oleh Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Pusat, serta melibatkan semua K/L yang terkait. Setelah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap PPKM tahap I dan Tahap II, serta diberlakukannya PPKM Mikro sebagai langkah lanjutan maka skema pelaksanaan PPKM juga disesuaikan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Napitu, U., Corry., & Matondang, K. D. (2021). Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Mikro Di Kelurahan Bah Kapul. *Community Development Journal: jurnal pengabdian masyarakat*, 2(2), 232-241.

- 
- a. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan WFH sebesar 50%, dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara lebih ketat (untuk kantor pemerintahan, sesuai SE Menteri PAN RB).
  - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan (Online).
  - c. Untuk Sektor Esensial, yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan.
  - d. Melakukan pembatasan kegiatan restoran/mall:
    - 1) Kegiatan restoran makan/minum ditempat sebesar 50%
    - 2) Pembatasan jam operasional mall/pusat perbelanjaan sampai dengan pukul 20.00
    - 3) Pemesanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang (take-away/delivery) tetap diizinkan.
  - e. Kegiatan Konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
  - f. Kegiatan di tempat ibadah dapat dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
  - g. Menutup Fasilitas Umum, menghentikan sementara Kegiatan Sosial Budaya.
  - h. Membatasi kapasitas dan jam operasional modal transportasi umum.

#### 2.4.2 Kebijakan PPKM di wilayah Aceh

Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 12/INSTR/2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 ditingkat gampong atau nama lain untuk pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 yang mana isinya adalah Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini diinstruksikan: KESATU: a. Bupati/ Walikota mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM Mikro) sampai dengan tingkat Gampong atau nama lain yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Gampong atau nama lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di Gampong atau nama lain, maka skenario pengendalian dilakukan dengan Surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Gampong atau nama lain selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Campong atau nama lain selama 7 (tujuh) hari terakhir. maka iskenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak, dan tempt umum lain kecuali sektor esensial.
4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Gampong atau nama lain selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM Mikro tingkat Gampong atau nama lain yang mencakup:
  - a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  - b) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  - c) mengatur pembatasan pelaksanaan ibadah dan kegiatan lainnya di rumah ibadah dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

- d) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran Covid-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
- e) melarang kerumunan lebih dari 10 (sepuluh) orang
- f) membatasi keluar masuk wilayah Gampong atau nama lain paling lama hingga pukul 22.00 WIB.
- g) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Gampong tau nama lain yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.<sup>8</sup>

Wabah pandemi Covid-19 mengakibatkan tingkat kepanikan, kecemasan dan depresi baik pada kalangan muda maupun dewasa. Hal tersebut tentunya menimbulkan reaksi bagi pemerintah sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan atau tindakan secara cepat dan tepat salah satunya adalah melakukan upaya “Lock Down” dalam rangka untuk menanggulangi wabah virus Corona. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup sekolah, fasilitas umum, restoran dan tempat ibadah sampai waktu yang tidak dapat ditentukan.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberbagai daerah di Indonesia menimbulkan dampak yang cukup besar. Penyebaran Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian di Indonesia salah satunya yaitu usaha Cafe-cafe, khususnya pada wilayah PSBB menutup kegiatan pembelajaran dan juga pekerjaan baik ditingkatan sekolah hingga perguruan tinggi dan juga perkantoran. Seluruh

---

<sup>8</sup> Instruksi Gubernur (Ingub) *Nomor 12 Tahun 2021* tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro level 4 bagi Kota Banda Aceh. hlm. 2.

masyarakat tidak dapat beraktivitas seperti biasanya, semua melakukan belajar mengajar, pekerjaan secara online.<sup>9</sup>

## 2.3 Usaha Cafe

### 2.5.1 Pengertian Usaha

Menurut besar Kamus Besar Bahasa Indonesia, Usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari untung<sup>10</sup>.

Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto. Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha dalam sains adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut<sup>11</sup>.

Menurut Harmaizar Z. Usaha bisa disebut perusahaan merupakan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap atau terus menerus untuk mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan. Baik perorang maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Immanuela Tiffany Soumokil, V., & Umrotu, M. (2022). *Penurunan Pendapatan Akibat Covid-19 Terhadap Cafe-Cafe di Kilometer 10 Kota Sorong Pada Tahun 2021 (Studi pada Kilometer 10 Kota Sorong)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

<sup>10</sup> Weinata Sairin, *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan di Indonesia antara Konseptual dan Operasional*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), h. 35.

<sup>11</sup> Wasis, Sugeng Yuli Irianto, *Ilmu Pengetahuan Alam*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 172.

<sup>12</sup> Harmaizar Z, *Menangkap Peluang Usaha*, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa Ed. II, 2008), h. 13.

### 2.5.2 Pengertian Usaha Cafe

Usaha cafe di Indonesia saat ini khususnya dikota-kota besar semakin berkembang dengan pesat, banyak bermunculan wirausahawan yang membuka usaha café dengan berbagai konsep atau ide-ide yang dibuat untuk memikat pelanggan dari berbagai kalangan, selain itu beberapa lokasi dikota kecil bahkan juga banyak juga bermunculan café, hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah setempat yang mempermudah perizinan mendirikan usaha.

Usaha cafe adalah tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang dimana pengunjung dapat memesan minuman dan makanan yang tersedia pada setiap cafe. Cafe termasuk tipe restoran namun lebih mengutamakan suasana rileks, hiburan dan kenyamanan pengunjung sehingga menyediakan tempat untuk nongkrong yang nyaman dan alunan musik santai agar para tamu lebih betah dan lebih lama menghabiskan waktu di cafe. Umumnya masyarakat yang berusia 15-29 tahun merupakan usia produktif sehingga memerlukan tempat untuk bersantai, bersosialisasi, bertemu rekan kerja dan berkumpul bersama teman. Desain cafe sangat beragam, dari cafe yang terkesan eksklusif hingga cafe yang standar. Cafe tersebut memiliki spesifikasi dalam menjual produknya. Saat ini usaha cafe muncul menjadi usaha yang memiliki konsep tempat, konsep jualan (marketing), konsep kemasan, konsep menu dan konsep pelayan yang menarik. Suasana di setiap cafe yang memiliki ciri khas berbeda-beda menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen, sehingga cafe-cafe semakin berkembang dan banyak diminati. Adapun beberapa cafe yang menawarkan kesan santai, tenang dan nyaman untuk berkumpulnya konsumen dengan keluarga, pasangan, teman, rekan kerja atau hanya sekedar ingin

bersantai menikmati suasana ada juga cafe yang menyediakan musik-musik rock, terlihat seperti berisik tetapi banyak pelanggan yang mendatangi cafe tersebut.

Menurut Sugiarto, Cafe adalah suatu usaha di bidang makanan yang dikelola secara komersial yang menawarkan pada para tamu makanan atau makanan kecil dengan pelayanan dalam suasana tidak formal tanpa di ikuti suatu aturan atau pelayanan yang baku (sebagaimana sebuah exclusive dining room), jenis-jenis makanan atau harganya lebih murah karena biasanya beroperasi selama 24 jam, dengan demikian dapat dipastikan sebuah cafe akan tetap buka ketika restoran-restoran lainnya sudah tutup.

Menurut Marsum Cafe adalah tempat untuk makan dan minum sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi, selain itu juga merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk didalam dan diluar restoran Kebanyakan cafe tidak menyajikan makanan berat namun lebih berfokus pada menu makanan ringan seperti kue, roti, sup, dan minuman. Cafe pertama kali muncul di daerah barat.

Menurut Indrayana, Café adalah tempat untuk makan dan minum sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi Biasanya Cafe menyediakan menu yang lebih sedikit dibanding restoran. Tetapi cafe menawarkan suasana relaksasi bagi para konsumennya yang merasa lelah dan jenuh. Cafe Angkringan menawarkan suasana tradisional yang dapat membuat kenyamanan tersendiri bagi konsumen yang datang dengan menu khas selera anak muda untuk bersantai, Wifi dan berkumpul sekaligus makan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa café merupakan tempat yang menyajikan makanan baik makanan berat maupun ringan serta minuman untuk dipesan dan disantap dengan suasana yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan suasana rileks dan nyaman untuk pengunjungnya.

### 2.5.3 Peran Usaha Cafe

Peran usaha cafe dalam pembangunan perekonomian bangsa secara memiliki peran :

1. Membuka peluang ekonomi masyarakat;
2. Penyedia lapangan kerja;
3. Berperan penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian ditujukan untuk memahami gejala-gejala sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan, Peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian menggambarkan atau melukiskannya sebagaimana adanya, sehingga pemanfaatan temuan penelitian ini berlaku pada saat itu pula yang belum tentu relevan bila digunakan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.

<sup>14</sup> Soendari, T. (2012). Metode Penelitian Deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17.

### 3.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dipilih berdasarkan jenis pekerjaan warga daerah Lhoknga yang terdampak langsung terhadap kebijakan PPKM. Dalam hal ini subjek penelitian yang dipilih adalah pemilik usaha cafe. Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Sugiyono menyatakan bahwa objek penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>15</sup>

Selanjutnya, peneliti menentukan subjek penelitian dengan memilih responden yang menjadi pelaku usaha cafe. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari empat pelaku usaha cafe

Subjek ini dipilih karena pertimbangan bahwa pada umumnya pelaku usaha cafe pada daerah pantai Lhoknga tersebut. Subjek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Maha Corner, Taman Tepi Laut, Cemara Café, dan Adek Abang Café untuk subjek pelaku usaha cafe. Berikut paparan hasil penelitian dengan kedua pelaku usaha tersebut terkait “Dampak Kebijakan PPKM Terhadap Perekonomian Usaha Cafe Dikawasan Rekreasi Mon Iku Lhoknga Aceh Besar”.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 118.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono, dalam teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik yang sesuai agar seluruh data yang diperlukan dapat terkumpulkan dengan baik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### **3.3.1 Wawancara**

Menurut sugiyono wawancara yaitu sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit. Adapun informan yang akan peneliti wawancarai yaitu owner dari Maha Corner, Taman Tepi Laut, Cemara Café, dan Adek Abang Cafe.

#### **3.3.2 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, agenda, dan lainnya. Menurut sugiyono dokumentasi adalah catatan peristiwa yang berlalu. Baik berupa tulisan, gambar, karya-karya.

#### **3.3.3 Observasi**

Observasi adalah upaya pengumpulan data dengan menggunakan metode merekam data dari indera tubuh diantaranya mata dan telinga. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan nonparticipation observer yaitu bentuk observasi dimana

peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok dan tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi objek wisata di daerah Lhoknga Aceh Besar untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan ppkm terhadap perekonomian usaha mikro di Lhoknga Aceh Besar.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Menurut Ahmad Rijali kegiatan analisis data kualitatif merupakan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

#### **3.4.1 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, sumber data dalam kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis. Kata-kata dan tindakan informan merupakan sumber data utama.

### **3.4.2 Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dapat disimpulkan reduksi data merupakan meringkas hal-hal yang pokok dari hasil pengumpulan data serta fokus kepada hal yang penting.

### **3.4.3 Penyajian Data**

Tahap penyajian data merupakan suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Tahap penyajian data ini dalam bentuk teks yang bersifat naratif, kegiatan mendisplaykan data ini harus dengan analisis yang mendalam karena hasil kategorisasi yang telah dilakukan terhadap reduksi data harus disusun secara berurutan pada tahap ini untuk melihat struktur dari penelitian. Kecenderungan pemahaman ini yang harus menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. Setelah menempuh dua proses tersebut selanjutnya dapat diambil kesimpulan sehingga diharapkan dapat menghasilkan kebermaknaan data dan dapat menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

### **3.4.4 Penarikan Kesimpulan**

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keterangan penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek penelitian yang diambil dalam penelitian berlokasi di Lhoknga. Lhoknga merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari empat mukim yaitu, Mukim Lhoknga, Mukim Lamhom, Mukim Keuh, dan Mukim Lampuuk, dengan total luas wilayah 87,95 Km atau 8.795 Ha. Ibukota kecamatan Lhoknga sendiri adalah Mon Ikeun. Kecamatan Lhoknga merupakan salah satu wilayah yang mengalami dampak sangat parah akibat bencana tsunami pada 26 Desember 2004. Kecamatan Lhoknga hanya berjarak 15 Km dari Banda Aceh dan dapat ditempuh sekitar 25 menit dengan kendaraan bermotor.

Objek penelitian ini merupakan wilayah wisata pantai yang menyajikan panorama indahnyanya pantai yang dihiasi dengan pasir putih. Selain itu, Pantai Lhoknga juga menjadi salah satu pantai dengan spot surfing terbaik di Aceh, sehingga tidak heran banyak wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah serta wisatawan luar negeri yang mengunjungi wilayah tersebut.

##### **4.1.1 Letak Geografis**

Secara geografis kecamatan Lhoknga memiliki luas wilayah 87,95 Km atau 8.795 Ha. Daerah ini terdiri dari 4 mukim dan 28 gampong. Adapun rincian letak geografis pada wilayah kecamatan Lhoknga adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Nama-Nama Gampong Menurut Mukim di Kecamatan Lhoknga**

No	Mukim	Nama Gampong	Luas Wilayah Gampong (Km2)
1	Lhoknga (Luasnya 31,30 Km2)	Mon Ikeun	28,67
		Weuraya	0,21
		Lamkruet	0,61
		Lampaya	1,81
2	Keuh (Luasnya 33,52 Km2)	Lamgaboh	0,66
		Aneuk Paya	0,62
		Naga Umbang	11,12
		Lambaro Kueh	13,75
		Lam Ateuk	0,39
		Kueh	0,47
		Nusa	2,90
		Seibun Keutapang	0,63
		Seibun Ayon	0,78
		Tanjong	0,37
		LaMaha Cornerok	0,36
		Lambaro Seibun	1,46
3	Lamhom (Luasnya 12,04 Km2)	Meunasah Karieng	0,10
		Mns Mesjid Lam Lhom	0,21
		Meunasah Manyang	0,97
		Meunasah Lamgirek	6,80
		Meunasah Moncut	1,44
		Meunasah Baro	0,59
		Meunasah Beutong	1,93
4	Lampuuk (Luasnya 11,08 Km)	Mns Mesjid lampuuk.	0,78
		Meunasah Balee	8,49

	Meunasah Lambaro	1,19
	Meunasah Cut	0,13
	Meunasah Blang	0,49

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar (2023)*

Daerah kemukinan Lhoknga berjarak sekitar 15 Km dari pusat kota Banda Aceh dan mempunyai batas-batas wilayah, adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Peukan Bada
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Leupung
- c. Sebelah Barat : Samudra Hindia
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal dan Kecamatan Simpang Tiga

Di kemukiman Lhoknga terdapat 2 gampong yang berpotensi mensejahterakan masyarakatnya dari sektor wisata, yaitu gampong Mon Ikeun dan Lampaya. Karena gampong Mon Ikeun sendiri adalah wilayah yang paling langsung berhadapan dengan pantai.

Secara ekonomi gampong Mon Ikeun dapat dikatakan telah mandiri dalam menata peluang bisnis dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Suatu daerah mempunyai keunikan tertentu yang bisa dikembangkan untuk menarik wisatawan. Potensi tersebut bisa berbentuk keindahan alam, kenyamanan udara dan iklim maupun daya tarik lainnya seperti sejarah dan penampilan seni. Daya tarik ini merupakan peluang besar untuk menjadi penghasilan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Mon ikeu merupakan salah satu desa yang potensial bagi wisatawan, Desa tersebut terletak dipinggir Pantai yang memiliki panorama alam yang menarik, letaknya berada dipinggir jalan nasional yang sangat mudah dijangkau oleh wisatawan, disana terdapat banyak café-café yang menawarkan aneka kuliner dan tempat bersantai yang nyaman.

Sector pariwisata ini telah menjadi usaha unggulan masyarakat. Terlebih lagi, jika usaha pariwisata tersebut tidak hanya terhenti pada usaha penginapan, rumah makan dan transportasi. Usaha pariwisata ini bisa melebar ke usaha-usaha lain lagi seperti pengadaan barang souvenir, kerajinan, kesenian, pemandu wisata dan bentuk jasa lainnya. Sehingga keuntungan yang didapat tidak hanya pada segelintir orang yang mempunyai akses pada usaha penginapan, makanan dan transport, tapi juga pada masyarakat di sekeliling daerah wisata tersebut. Bukan tidak mungkin, apa yang dimiliki Bali dan Jogja juga bisa dihadirkan di Aceh, seperti apa yang akan tertulis dalam tulisan dibawah ini.

Surfing Beach berada di Gampong Moen Ikeun. Oleh karena itu, usaha penginapan ini juga tidak terdapat di semua desa di mukim Lhok'nga, karena desa ini berdekatan dengan pantai Surfing beach. Desa Mon Ikeun terdiri dari empat dusun yaitu dusun Dayah, Dusun Maimun Saleh, dusun Krung Raba dan dusun ombak Meualun.

Selain mendatangkan pendapatan lewat penjualan di warung makan, masyarakat Mon Ikeun juga terberdayakan dalam bentuk pengadaan guide. Para turis manca negara yang datang menginap di Mon Ikeun membutuhkan guide lokal

untuk membawa mereka ke beberapa spot menarik di sekitar LhokNga. Karenanya, anak-anak muda di Mon Ikeun terlatih untuk menjadi guide sehingga mengurangi jumlah pengangguran di desa tersebut. Lamanya mereka di Mon Ikuen bukan hanya untuk surfing tapi juga untuk melewati musim dingin dinegaranya. Biaya hidup di Indonesia lebih murah dibandingkan dinegara mereka. Dengan biaya 30.000.000, mereka bisa hidup di Mon Ikeun.

Potensi keindahan alam dan bahari serta kenyamanan udara dan iklim tropis menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Daya tarik inilah yang memberikan peluang besar untuk menambah penghasilan masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Ciri khas dari Pantai lhoknga karena pesona keindahan alam yang dimilikinya sangat indah serta memiliki ombak yang dianggap bersahabat bagi destinasi wisata. Ketinggian ombak Pantai lhoknga berkisar 1,5 hingga 2 meter saja, ditambah kondisi air pantainya yang sangat bersih menjadikan Pantai lhoknga sebagai lokasi yang nyaman khususnya bagi mereka yang suka dengan aktivitas surfing. desa Mon ikeun adalah salah satu pantai yang ada di Lhoknga di sebut surganya surfing atau Surfing Beach. Para surfer mancanegara ini datang ketika sudah mulai angin timur (sekitar bulan oktober hingga Maret).

Potensi keindahan alam dan bahari serta kenyamanan udara dan iklim tropis menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Daya tarik inilah yang memberikan peluang besar untuk menambah penghasilan masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Potensi keindahan panorama alam sekitar menjadi daya tarik dari objek wisata dikawasan lhoknga, apalagi saat menikmati keindahan matahari terbenam. Adapun keindahan pasir Pantai lhoknga juga menjadi spot yang nyaman untuk melakukan aktivitas bersama keluarga, pasir Pantai lhoknga tergolong sebagai pasir putih.



Sumber : Google Maps

**Gambar 4.1 Peta Kecamatan Lhoknga**

#### **4.2 Hambatan Penerapan PPKM Bagi Pelaku Usaha Cafe**

Pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 merupakan salah satu virus yang sangat membahayakan dan dapat menyerang tubuh manusia dengan sangat cepat. Menurut World Health Organization (WHO) Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sudah tersebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Covid-19 di Indonesia telah

menyebar ke 510 kabupaten/ kota dalam 34 provinsi dan jumlahnya terus meningkat.

Ilmu politik merupakan salah satu cabang ilmu dengan objek kajian sosial yang erat kaitannya dengan ilmu sosial yang lain seperti ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi, dan lain-lain yang mengkaji keadaan manusia sebagai anggota kelompok. Ilmu-ilmu tersebut secara umum mempelajari tentang cara-cara manusia hidup dan bekerja sama.<sup>16</sup> Selain itu, ilmu politik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu politik merupakan kajian ilmu yang berkaitan dengan hubungan manusia yang ditinjau dari segi manusia sebagai suatu kelompok serta interaksi antara pemerintah dengan masyarakat terkait dengan keputusan yang dapat dijadikan sebagai pengikat tentang kebaikan bersama.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan secara bersama. Kebijakan pemerintah pada umumnya ditujukan untuk publik (negara, masyarakat, dan kepentingan umum) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik.

Data hasil penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa pelaku usaha yang menjadi informan dalam penelitian ini. Hasil penelitian bagian ini disampaikan secara rinci, dilengkapi beberapa kalimat-kalimat langsung dari

---

<sup>16</sup> Suhartana. G.M. (2016). Kajian Politik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. 2(2), 117-122.

responden dan beberapa informasi dari peristiwa yang di observasi terkait dengan tujuan penelitian. Kemudian data tersebut diinterpretasikan untuk mengungkapkan hasil antara data yang dideskripsikan dengan harapan yang ingin dicapai dari tujuan penelitian. Pada bagian berikutnya hasil penelitian tersebut dibahas untuk menemukan substansi persoalan.

Hasil penelitian mengenai hambatan dalam penerapan PPKM bagi pelaku usaha cafe difokuskan pada beberapa point yakni : (a) Kendala dalam kegiatan usaha, (b) aspek keuangan (c) aspek tenaga kerja (d) aspek intervensi pemerintah.

#### 1. Hambatan/Kendala dalam kegiatan usaha

Pemberlakuan PPKM yaitu pembatasan aktivitas sangat berimbas pada pelaku usaha cafe baik pada subjek Maha Corner, Taman Tepi Laut, Cemara Cafe, Dan Adek Abang Cafe. Kebijakan yang diambil pemerintah dengan membatasi aktivitas masyarakat berdampak pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh subjek Maha Corner, Taman Tepi Laut, Cemara Cafe, Dan Adek Abang Cafe. Peraturan tidak Boleh dibukanya obyek wisata dimana salah satunya mereka mengandalkan dari pengunjung yang akan membeli produk (barang/ jasa) yang mereka tawarkan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap keterlaksanaanya usaha subjek Maha Corner, Taman Tepi Laut, Cemara Cafe, Dan Adek Abang Café.

Hasil wawancara dengan subjek Maha Corner terkait dengan keterlaksanaanya usaha yang dilakukan olehnya adalah sebagai berikut:

*“Ketika PPKM terjadi usaha kami ini berdampak terhadap kegiatan usaha, dimana usaha kami harus berhenti berkaktifitas sebentar. Namun beberapa minggu setelah dikeluarkan kebijakan PPKM tersebut kami masih berhenti untuk kegiatan*

*makan dan minum di tempat, namun kami hanya menyediakan pesanan takeaway saja”.*<sup>17</sup>

Kutipan pernyataan subjek Maha Corner menggambarkan bahwa usaha yang dijalankan harus berhenti sementara dari segala aktivitas yang mengundang kerumunan. Keadaan ini menjadi salah satu gambaran bahwa kegiatan usaha tidak berjalan dengan baik. Dari pernyataan tersebut pula, tergambar kegiatan usaha yang dilakukan subjek Maha Corner terkendala karena adanya larangan untuk berkunjung ke tempat usaha guna menikmati secara langsung di tempat. Usaha yang dijalankan oleh subjek Maha Corner selama penerapan kebijakan PPKM hanya dapat dilakukan dengan cara online yaitu melalui pesan antar ke konsumen.

Lebih lanjut, peneliti mengkaji hambatan/kendala lain yang dihadapi subjek Maha Corner pada saat penerapan PPKM di masa pandemi covid. Berikut kutipan wawancara dengan subjek Maha Corner sebagai berikut:

*“Kendala yang kami rasakan ketika PPKM berlaku adalah ketika kami membuka usaha kami dengan intensitas pengunjung yang ramai berdatangan ke tempat usaha kami dan apabila sudah seperti itu maka kami menerima teguran dari aparat pemerintah yang bertugas”.*<sup>18</sup>

Berdasarkan respon subjek Maha Corner di atas, diperoleh informasi bahwa usaha yang dijalankan sempat dilanjutkan pelaksanaannya dengan membolehkan pengunjung menikmati makan dan minum di tempat. Pada saat usahanya dijalankan kembali, animo masyarakat untuk mengunjungi tempat tersebut sangat besar dan menyebabkan terjadinya kerumunan. Keadaan ini langsung ditanggapi dengan

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Maha Corner pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

<sup>18</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Maha Corner pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

teguran dari pihak aparat pemerintahan untuk segera menutup kembali tempat usahanya tersebut. Penutupan kembali usaha dilakukan untuk menjalankan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Keadaan ini menjadikan omset terhadap usaha yang dijalankan mejadi menurun dari keadaan sebelum pemberlakuan kebijakan PPKM.

Selanjutnya, data terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan PPKM pada pelaku usaha cafe pada kategori rendah juga dikaji melalui wawancara pada subjek Taman Tepi Laut. Adapun penjelasan terkait kendala yang dihadapi subjek Taman Tepi Laut dalam menjalankan usahanya pada saat pemberlakuan kebijakan PPKM adalah sebagai berikut:

*“Ketika dilaksanakan PPKM tidak ada pengunjung ke pantai, jadi kami selaku pelaku usaha sangat merasakan dampak dari kebijakan tersebut, dimana usaha ini adalah sebagai sumber mata pencaharian kami untuk kehidupan sehari-hari. Saat kebijakan tersebut di buat kami harus menutup total tempat usaha kami karena tidak ada pengunjung di pantai”.*<sup>19</sup>

Hasil wawancara menggambarkan bahwa tempat usaha yang dijalankan oleh subjek Taman Tepi Laut ditutup total pada saat pemberlakuan kebijakan PPKM. Penutupan tempat usaha ini dikarenakan memang tidak ada pengunjung yang datang ke pantai akibat adanya pelarangan berkerumunan ditempat umum. Subjek menjelaskan bahwa keadaan ini menjadi faktor utama terhambatnya usaha yang dijalankan. Secara perekonomian hal ini jelas menjadi masalah yang dihadapi guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Padahal, subjek Taman Tepi Laut

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Taman Tepi Laut pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

mengakui bahwa usaha yang dijalankan merupakan satu-satunya sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lebih lanjut, subjek Taman Tepi Laut menjelaskan terkait kendala kegiatan aktifitas usaha yang dijalankan. Berikut petikan wawancara dengan subjek Taman Tepi Laut:

*“Kami tutup sementara namun ketika usaha kami buka kembali jumlah pengunjung juga mengalami penurunan, karena memang tidak ramai orang yang mengunjungi pantai. Mungkin orang-orang khawatir terserang covid”.*<sup>20</sup>

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa terbatasnya pengunjung yang mengunjungi pantai menjadi penyebab penurunan pengunjung pada usaha yang dijalankan subjek Taman Tepi Laut. Dengan terbatasnya jumlah pengunjung menjadi kendala untuk pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk bertahan. Bagi pelaku usaha cafe berkurangnya jumlah pengunjung dapat mengurangi pemasukan harian mereka. Sehingga pendapatan yang didapatkan oleh pelaku usaha menurun dari pendapatan sebelum diterapkan PPKM. Berkurang maupun bertambahnya jumlah pengunjung bagi pelaku usaha sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usahanya.

Keadaan yang sama juga dialami oleh subjek Cemara Cafe dan Adek Abang Cafe. Pemberlakuan PPKM memberikan efek pada perekonomian usahanya. Berikut petikan wawancara dengan subjek Cemara Cafe:

*“Kebijakan PPKM sangat mempengaruhi penghasilan kami sebagai pelaku usaha pada tempat wisata ini, karena jarang sekali ada pengunjung ditempat*

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Taman Tepi Laut pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

wisata ini. Sehingga kami harus menutup usaha yang kami lakukan biasanya. Karena jika dibuka juga tidak datang pengunjungnya.<sup>21</sup>

Petikan wawancara dengan subjek Adek Abang Cafe sebagai berikut:

*“Ketika masa covid itu, kami menutup tempat usaha kami, karena tidak ada pengunjung ke laut. Jelaslah penghasilan tidak ada, karena kami hanya mencari nafkah melalui usaha tersebut.”<sup>22</sup>*

Hasil wawancara dengan subjek Cemara Cafe dan Adek Abang Cafe menggambarkan hambatan dalam menjalankan usaha dikarenakan tidak ada pengunjung yang datang pada tempat wisata, sehingga subjek memilih untuk menutup tempat usahanya. Hal ini berimbas pada perekonomiannya karena subjek tidak memiliki penghasilan untuk kehidupan sehari-hari.

Uraian hambatan dalam aspek pelaksanaan kegiatan usaha pada subjek Maha Corner dan Taman Tepi Laut menggambarkan bahwa kedua pelaku usaha tersebut tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik. Hal ini tentu saja memberikan pengaruh terhadap pendapatan yang mereka terima dari hasil usaha yang dijalankannya. Kedua subjek mengalami hambatan dalam kegiatan usahanya dimana usaha mereka harus ditutup sementara, sehingga hal tersebut berdampak pada pendapatan pelaku usaha yang berbeda dari sebelumnya.

Hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha tentu saja mempengaruhi kegiatan usaha yang dijalankan. Namun, para pelaku usaha mengupayakan berbagai

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan pemilik Cemara Cafe pada hari dan tanggal : Minggu 13 Juli 2023

<sup>22</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Taman Tepi Laut pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi bahkan mengatasi hambatan usaha yang dialami. Hal ini dilakukan oleh subjek Maha Corner sebagai pelaku usaha, dimana subjek menerapkan berbagai strategi dalam menghadapi hambatan yang dialami pada masa pemberlakuan PPKM. Strategi yang diterapkan subjek Maha Corner dijelaskan melalui kutipan wawancara berikut:

*Sstrategi yang kami terapkan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan tempat usaha kami dengan cara memposting setiap menu yang kami sediakan untuk bisa di takeaway maka dengan cara itu kami lakukan supaya usaha kami untuk terus berjalan di era pandemic. Selain itu, kami juga membuat kreasi makanan atau minuman baru kemudian memposting di media sosial”.*<sup>23</sup>

Kutipan wawancara dengan subjek Maha Corner di atas memberikan gambaran bahwa, dalam menghadapi hambatan yang dialami dalam menjalankan usaha, pelaku usaha juga menerapkan berbagai strategi. Subjek memanfaatkan promosi melalui media sosial dengan membuat postingan pada akun media sosial mereka terkait menu-menu makanan atau minuman yang disediakan. Penjualan melalui pesan antar memungkinkan konsumen tetap dapat menikmati menu-menu yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Selain itu, subjek Maha Corner juga mengkreasikan berbagai menu baru baik makanan maupun minuman yang juga dipromosikan melalui media sosial. Hal ini dilakukan agar kegiatan usaha yang dimilikinya tetap berjalan dengan baik meskipun pengunjung tidak menikmati secara langsung di tempat usahanya.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Maha Corner pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

Sebaliknya, pelaku usaha lainnya yaitu subjek Taman Tepi Laut, Cemara Cafe, dan Adek Abang Cafe tidak menerapkan strategi apapun dalam menghadapi kendala pada saat pemberlakuan kebijakan PPKM pada masa pandemic covid. Adapun kutipan wawancara dengan subjek Taman Tepi Laut adalah sebagai berikut:

*“Kami tidak melakukan strategi apapun untuk bertahan pada saat PPKM berlangsung karena kami menutup sementara tempat usaha yang kami jalankan”*

<sup>24</sup>

Kutipan wawancara dengan Cemara Cafe adalah sebagai berikut:

*“Tidak ada strategi khusus yang kami lakukan untuk menjalankan usaha kami, kami mencari kegiatan lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti bercocok tanam tanaman sayuran yang dapat dikonsumsi sehari-hari.”<sup>25</sup>*

Kutipan wawancara dengan subjek Adek Abang Cafe adalah sebagai berikut:

*“Kami pasrah saja dengan menutup usaha, tanpa mencari solusi menerapkan strategi untuk menjalankan usaha kami. Karena memang tidak ada pengunjung dan juga café kami juga bukan café yang besar.”<sup>26</sup>*

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Taman Tepi Laut pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

<sup>25</sup> Wawancara dengan pemilik Cemara Cafe pada hari dan tanggal : Minggu 13 Juli 2023

<sup>26</sup> Wawancara dengan pemilik Café Adek Abang pada hari dan tanggal : Minggu 13 Juli 2023

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, terlihat bahwa subjek Taman Tepi Laut, Cemara Cafe, dan Adek Abang Cafe memilih menutup tempat usahanya tanpa menerapkan strategi apapun dalam menghadapi hambatan yang dialami.

Dengan demikian, secara keseluruhan data terkait hambatan yang dialami oleh pelaku usaha cafe kategori sedang dan rendah yang diperoleh dalam menjalankan kegiatan usaha dalam masa pemberlakuan kebijakan PPKM yaitu tidak berjalannya kegiatan usaha sebagaimana biasanya. Hal ini dikarenakan larangan berkerumunan yang dikeluarkan pemerintah. Larangan ini menjadikan pengurangan pengunjung pada daerah pantai yang mempengaruhi pula berkurangnya pengunjung pada usaha perdagangan di area wisata pantai.

Selama berlakunya PPKM para pelaku usaha harus meninjau kembali strategi yang akan mereka terapkan selama masa PPKM. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa para pelaku usaha ingin tetap berjalannya usaha mereka membuat strategi dengan memanfaatkan media social untuk mempromosikan usaha mereka. Tidak hanya dengan menggunakan media social, tetapi mereka juga melakukan sistem *take away* selama masa PPKM. Strategi yang mereka lakukan adalah untuk mempertahannya usaha mereka agar tetap terus berjalan pada saat PPKM diberlakukan.

## 2. Aspek Keuangan

Pemberlakuan kebijakan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah juga sangat berpengaruh pada aspek keuangan bagi pelaku usaha cafe. Pemberlakuan kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap omset pada usaha yang dijalankan pelaku usaha. Kegiatan usaha yang mengalami hambatan tentu berpengaruh pada

pendapatan yang diperoleh oleh pelaku usaha. Berikut paparan data terkait aspek keuangan pada pelaku usaha ekonomi cafe pada kategori sedang dan tinggi.

Berkaitan dengan aspek keuangan, subjek Maha Corner memberikan penuturan sebagai berikut:

*“Jadi pada saat berlakunya PPKM, kami selaku pelaku usaha sedikit mengalami penurunan pendapatan kami, karena sangat minimnya waktu operasional untuk tetap membuka tempat usaha kami. Untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan pendapatan tersebut maka sudah untuk mencukupi kebutuhan hidup selama PPKM berlangsung.”<sup>27</sup>*

Berdasarkan kutipan wawancara dengan subjek Maha Corner tersebut, diperoleh informasi bahwa pada saat penerapan kebijakan PPKM keadaan keuangan pada usaha yang dijalankan oleh subjek mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan ini selain karena pembatasan kunjungan konsumen juga diakibatkan oleh pengurangan jam operasional pelaksanaan usaha.

PPKM dilaksanakan untuk membatasi kegiatan masyarakat untuk beraktifitas seperti biasanya. Sehingga usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha mengalami penurunan pengunjung. Dengan berkurangnya pengunjung tentu saja berdampak pada sector keuangan terhadap pelaku usaha, yang mengakibatkan pelaku usaha sedikit mengalami kerugian, dimana disebabkan oleh kurangnya pemasukan pelaku usaha setiap harinya.

Tingkat pendapatan pelaku usaha ditentukannya oleh lamanya waktu operasional atau jam kerjanya. Jam kerja tersebut merupakan lamanya waktu yang

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Maha Corner pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

digunakan untuk menjalankan usaha, yang dimulai dari persiapan sampai tutup.

Seperti yang dijelaskan oleh pelaku usaha Maha Corner:

*“Selama PPKM jam kerja usaha kami berbeda dengan seperti biasanya, biasanya kami membuka usaha di pagi hari hingga sore, namun pada saat PPKM berlangsung kami hanya membuka dari siang hingga jam 4 sore saja. Kadaan ini jelas membuat omset usaha kami menurun dari sebelum PPKM”<sup>28</sup>*

Berdasarkan beberapa informasi di atas dapat dikatakan bahwa penurunan pendapat pada aspek keuangan pelaku usaha subjek Maha Corner dikarenakan pembatasan aktifitas serta jam operasional pelaksanaan usaha. Meskipun subjek telah menerapkan strategi penjualan menggunakan mekanisme *take away*, pengurangan waktu operasional juga jelas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap omset yang diterima pelaku usaha.

Keadaan yang lebih memprihatinkan terjadi pada subjek Taman Tepi Laut. Dengan adanya hambatan dalam kegiatan usaha, subjek sama sekali tidak menjalankan usahanya. Hal ini berakibat tidak adanya pemasukan pendapatan melalui usaha yang biasanya dijalankan. Berikut kutipan wawancara dengan subjek Taman Tepi Laut:

*“Ketika dilaksanakan PPKM kami selaku pelaku usaha sangat merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Dampak yang kami rasakan salah satunya terhadap omset usaha kami, dimana usaha ini sebagai sumber mata pencaharian kami untuk kehidupan sehari-hari. Saat kebijakan tersebut di buat kami harus menutup total tempat usaha kami”<sup>29</sup>*

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Maha Corner pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

<sup>29</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Taman Tepi Laut pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelas terlihat bahwa subjek Taman Tepi Laut mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan usaha yang dijalankan selama ini merupakan sumber utama mata pencaharian subjek tersebut. Keadaan ini menggambarkan bahwa penerapan kebijakan PPKM memberi dampak yang sangat buruk terhadap aspek keuangan pada pelaku usaha cafe pada kategori rendah.

Selanjutnya menurut pelaku usaha Taman Tepi Laut :

*“Selama PPKM berlangsung usaha kami tidak beroperasi sama sekali, kami menutup total tempat usaha kami.”<sup>30</sup>*

Dampak negatif terhadap keuangan yang dirasakan oleh subjek Cemara Cafe dan Adek Abang Cafe juga hampir sama dengan subjek Taman Tepi Laut. Penutupan tempat usahan pada subjek Cemara Cafe dan Adek Abang Cafe sangat mempengaruhi keuangan pada pemilik usaha tersebut. Mereka menuturkan bahwa dari usaha yang dijalankan selama ini mereka sama sekali tidak menghasilkan omset apapun pada masa PPKM. Berikut petikan wawancara dengan subjek Cemara Cafe:

*“Bukan hanya turun, bahkan tidak ada pemasukan sama sekali dari hasil usaha kami selama masa PPKM, karena usaha kami tutup.”<sup>31</sup>*

Hal senada juga diutarakan oleh subjek Adek Abang Cafe melalui kutipan wawancara berikut:

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Taman Tepi Laut pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

<sup>31</sup> Wawancara dengan pemilik Cemara Cafe pada hari dan tanggal : Minggu 13 Juli 2023

*“Karena usahanya tutup, maka kami sama sekali tidak ada pemasukan dari usaha café ini.”<sup>32</sup>*

Berdasarkan paparan dari subjek Cemara Cafe dan Adek Abang Cafe terlihat bahwa kedua subjek tersebut mengalami kendala keuangan pada masa PPKM dikarenakan mereka sama sekali tidak ada pemasukan dari tempat usaha yang biasanya mereka jalani.

Penurunan pendapatan pelaku usaha yang disebabkan karena kebijakan PPKM yang memberlakukan jam operasional untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga membuat pelaku usaha harus mengikuti aturan pemerintah. Sehingga terjadinya perbedaan pendapatan antara sebelum dan sesudah adanya PPKM.

Hasil paparan data terkait hambatan yang dialami oleh pelaku usaha café ditinjau dari aspek keuangan pada saat pemberlakuan kebijakan PPKM dapat digambarkan bahwa keempat subjek mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan ini disebabkan karena pembatasan jam operasional pelaksanaan usaha dan kurangnya aktifitas pengunjung pada objek wisata tersebut.

### 3. Aspek Tenaga Kerja

Pandemi Covid-19 berdampak sangat jelas pada pengurangan tenaga kerja dalam menjalankan suatu usaha. Terkendalanya kegiatan usaha dan pengurangan jam operasional pelaksanaan usaha mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah karyawan/ tenaga kerja yang dipekerjakan. Hal ini memaksa pelaku usaha untuk

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan pemilik Café Adek Abang pada hari dan tanggal : Minggu 13 Juli 2023

merumahkan sebagian pekerja yang bertujuan untuk menekan pengeluaran keuangan usahanya. Hal ini dialami oleh pelaku usaha pada subjek Maha Corner. Subjek menjelaskan terkait pengurangan tenaga kerja dalam menjalankan usaha miliknya. Berikut kutipan wawancara dengan subjek Maha Corner:

*“Saat berlakunya PPKM kami juga ada merumahkan beberapa tenaga kerja kami, sebelum adanya covid jumlah tenaga kerja di tempat kami kalau hari biasa berjumlah 15 orang dan di hari weekend adanya tambahan tenaga kerja menjadi 25 orang. Pada saat PPKM kami merumahkan 3 orang tenaga kerja di tempat kami. Untuk pembayaran gaji tenaga kerja, kami masih membayar dengan nominal yang sama seperti sebelum diterapkan PPKM.”<sup>33</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek Maha Corner, diperoleh informasi bahwa pengurangan tenaga kerja yang terjadi pada usahanya adalah sebanyak 20% dari jumlah tenaga kerja semula. Namun, untuk pembayaran gaji tenaganya tidak mengalami penurunan. Subjek Maha Corner tetap membayar gaji pada karyawannya sesuai dengan gaji yang diterima sebelum masa pandemi covid terjadi.

Disisi lain, pada usaha cafe yaitu pada usaha subjek Taman Tepi Laut, Cemara Cafe, dan Adek Abang Cafe penurunan jumlah tenaga kerja terjadi 100%. Hal ini dikarenakan usaha yang dijalankan oleh subjek ditutup total. Dengan demikian tenagakerja yang dirumahkan juga keseluruhan dari jumlah tenaga kerja yang ada. Berikut kutipan wawancara dengan subjek Taman Tepi Laut:

*“ Pada saat penerapan PPKM kami usaha kami tutup total, jadi kami meliburkan sementara tenaga kerja kami. Saat usaha kami beroperasi kembali*

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Maha Corner pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

*kami kembali memanggil kembali tenaga kerja kami. Untuk jumlah tenaga kerja kami berjumlah 5 orang tenaga kerja saja.”<sup>34</sup>*

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas, terlihat bahwa seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan pada usaha subjek Taman Tepi Laut dirumahkan sementara pada saat pemberlakuan PPKM. Namun, seluruh tenaga kerjanya dipekerjakan kembali ketika kondisinya lebih kondusif.

Subjek Cemara Cafe juga merumahkan pegawainya saat pelaksanaan PPKM di wilayah tempat usahanya. Berikut kutipan wawancara dengan subjek Cemara Cafe.

*“Waktu PPKM itu tempat usaha kami kan tutup, sehingga semua karyawan tidak bekerja.”<sup>35</sup>*

Hal yang sama juga diutarakan oleh subjek Adek Abang Cafe terkait aspek tenaga kerja dari tempat usahanya pada masa PPKM. Adapun petikan wawancaranya sebagai berikut:

*“Tempat usahanya tidak beroperasi, sehingga tenaga kerja kami juga liburkan selama PPKM.”<sup>36</sup>*

Berdasarkan hasil pemaparan data pada keempat subjek penelitian, diperoleh informasi bahwa pengurangan tenaga kerja terjadi dikarenakan adanya pemberlakuan kebijakan PPKM yang berimbas pada keterlaksanaannya kegiatan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Taman Tepi Laut pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

<sup>35</sup> Wawancara dengan pemilik Cemara Cafe pada hari dan tanggal : Minggu 13 Juli 2023

<sup>36</sup> Wawancara dengan pemilik Café Adek Abang pada hari dan tanggal : Minggu 13 Juli 2023

pelaksanaan usaha. Pengurangan jumlah tenaga kerja pada pelaku usaha dilakukan untuk mengurangi pengeluaran biaya usaha demi keberlangsungan usaha tersebut.

Wabah Covid-19 berdampak pada kemampuan mempekerjakan karyawan yang semakin melemah sehingga tanpa mitigasi sektor ekonomi yang tepat maka skenario terparah pada dunia usaha sangat mungkin terjadi. Para pelaku dunia usaha memiliki keterbatasan kemampuan finansial untuk mempertahankan usaha dan menggaji karyawannya sehingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat sulit untuk dielakkan. Ancaman lonjakan angka pengangguran diperkirakan meningkat tajam.

Dari beberapa hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menyatakan bahwa pada saat pandemi menyebabkan banyak pelaku usaha yang harus merumahkan tenaga kerja. Oleh sebab itu pemerintah berupaya menyediakan beberapa bantuan salah menyediakan modal kerja.

Pandemic covid-19 telah menyebar hampir di seluruh negara. Pandemic covid-19 memberikan yang besar terhadap perekonomian dunia, tidak hanya negara berkembang namun juga negara maju.

Pemberlakuan PPKM di beberapa wilayah pada saat covid-19 berimbas pada jam operasional suatu usaha. Dimana Badan Pusat Statistika (BPS) melakukan survey pada saat PPKM untuk melihat pelaku usaha. Hasil survey menunjukkan bahwa perusahaan yang menyikapi situasi pandemic memilih untuk melakukan pengurangan jumlah pegawai yang bekerja sebanyak 35,6% memilih untuk tidak mengurangi jumlah pegawai sebanyak 62,29% dan yang memilih untuk menambah

jumlah pegawai sebesar 2,15%. Perusahaan yang memilih untuk mengurangi jumlah pegawai yang paling banyak adalah di bidang industry pengolahan (52,23%), kontruksi (51,37) dan kemudia disusul 50,52% di bidang akomodasi dan makanan dan minuman.

Selanjutnya survey yang dilakukan oleh Bank Dunia memberikan informasi mengenai pasar tenaga kerja, dimana pada putaran pertama survey HiFy mengenai dampak sosial ekonomi dari pandemic covid-19 terhadap para peker aktif sebelum pandemic terjadi harus berhenti bekerja selama pandemic terjadi. Yaitu pada akhir bulan Mei 2020 yaitu 24% dari responden survey. Responden yang paling banyak adalah di sektor manufaktur, kontruksi dan trnsportasi, pergudangan dan komunikasi adalah yang paling banyak berhenti bekerja. Dari tenaga kerja yang masih aktif menyatakan bahwa mengalaminya pendapatannya menurun. sebanyak 90% tenaga kerja di sektor transportasi, perdagangan dan komunikasi mengalami penurunan pendapatan, kemudian di susul juga 80% tenaga kerja di sektor perdagangan perhotelan dan makanan mengalami penurunan.

Begitu juga pendapatan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan baik tenaga kerja formal dan yang informal ditemukan setidaknya ada sebanyak 2,1 juta pekerja yang merasakan dampak dari pandemic covid-19. Para pekerja yang berdampak sebanyak 283,6 ribu pekerja di PHK, sebanyak 1,13 juta pekerja dirumahkan dan sebanyak 630,9 ribu pekerja informal yang mengalami kehilangan pekerjaan atau bangkrut.

#### 4. Aspek Intervensi Pemerintah

Pemberlakuan kebijakan PPKM oleh pemerintah guna menekan penyebaran virus covid-19 dirasa sangat penting untuk dijalankan. Tentu saja kebijakan ini memberi pengaruh diberbagai bidang terutama bidang perekonomian masyarakat serta pendapatan per individu. Hasil penelitian ini juga memaparkan aspek intervensi pemerintah dalam mengatasi terpuruknya perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak langsung terhadap pemberlakuan kebijakan PPKM. Dari beberapa hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menyatakan bahwa pada saat pandemi menyebabkan banyak pelaku usaha yang harus merumahkan tenaga kerja. Oleh sebab itu pemerintah berupaya menyediakan beberapa bantuan salah menyediakan modal kerja.

Intervensi pemerintah yang dirasakan oleh pelaku usaha cafe pada saat pemberlakuan kebijakan PPKM pada masing-masing subjek ternyata berbeda. Berikut pemaparan pendapat subjek Maha Corner mengenai intervensi pemerintah dalam menghadapi penurunan pendapatan pada pelaku usaha. Adapun kutipan wawancara dengan subjek Maha Corner adalah sebagai berikut:

*“Pada saat PPKM kami tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah dan kami tidak melakukan pinjam modal usaha dari pihak manapun.”<sup>37</sup>*

Hasil wawancara dengan subjek Maha Corner di atas mengatakan bahwa subjek tidak menerima bantuan dari pemerintah. Hal ini dapat disebabkan karena

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Maha Corner pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

subjek tidak mengajukan pengajuan bantuan biaya modal untuk usahanya. Sehingga untuk menjalankan usahanya selama masa pandemic covid dan pemerlakuan kebijakan PPKM, subjek menggunakan modal usaha dari pribadinya sendiri.

Subjek Taman Tepi Laut memberikan pernyataan yang berbeda terkait intervensi pemerintah terhadap usaha yang dijalankan. Berikut kutipan hasil wawancara dengan subjek Taman Tepi Laut:

*“Pada saat PPKM berlangsung kami pernah menerima bantuan penambahan modal usaha dari pemerintah untuk membuka kembali tempat usaha yang kami jalankan. Untuk pinjaman kami tidak melakukan pinjaman penambahan modal dimanapun.”<sup>38</sup>*

Berdasarkan kutipan wawancara dengan subjek Taman Tepi Laut, diperoleh informasi bahwa subjek memperoleh bantuan dari pemerintah melalui pengajuan penerimaan bantuan modal usaha.

Respon yang diberikan subjek Cemara Cafe dalam hal intervensi pemerintah terhadap usahanya pada masa PPKM adalah sebagai berikut:

*“Pada masa PPKM kami pernah mengajukan permohonan bantuan dana untuk modal usaha kepada pemerintah, namun dana tersebut tidak pernah kami dapatkan. Mungkin persyaratan yang kami ajukan tidak lengkap atau mungkin ada pertimbangan lain. Kami hanya menerima bantuan BLT dari pemerintahan desa.”<sup>39</sup>*

Aspek intervensi dari pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan PPKM, usaha cafe pada kategori sedang dan rendah menggambarkan keadaan yang

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Taman Tepi Laut pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

<sup>39</sup> Wawancara dengan pemilik Cemara Cafe pada hari dan tanggal : Minggu 13 Juli 2023

berbeda. Intervensi pemerintah terjadi dengan pemberian modal bantuan yang diberikan pada pelaku usaha mikro. Namun, salah satu subjek tidak melakukan pengajuan pemberian dana batuan sebagai modal usaha.

Subjek Adek Abang Cafe memberikan respon yang bertolak belakang dari subjek-subjek sebelumnya. Adapun kutipan wawancara dengan subjek Adek Abang Cafe adalah sebagai berikut:

*“Saya mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui pengajuan proposal permohonan dana bantuan kepada korban terdampak langsung kebijakan PPKM. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai yang masuk ke rekening. Pengajuan ini dilakukan secara online berdasarkan informasi dari tetangga saya. Tapi tetap saja saya tidak bisa menjalankan usaha karena tidak ada pengunjung”<sup>40</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa aspek intervensi dari pemerintah dirasakan oleh subjek Adek Abang Cafe yaitu berupa pemberian bantuan modal usaha. Namun, subjek tetap saja tidak dapat menjalankan usahanya dikarenakan area wisata sekitaran tempat usaha subjek tidak berjalan seperti biasa. Pengurangan pengunjung bahkan tidak adanya pengunjung yang dapat ketempat wisata mengakibatkan subjek tetap tidak melakukan kegiatan usahanya.

Pemerintah Aceh merealisasikan bantuan stimulus ekonomi untuk pelaku usaha, bantuan itu diberikan dalam rangka pemulihan dan pemberdayaan UKM yang terdampak pandemic covid. Program tersebut sangat bermanfaat karena mengingat situasi pandemic covid yang juga memberi dampak besar pada sector

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan pemilik Café Adek Abang pada hari dan tanggal : Minggu 13 Juli 2023

ekonomi. Dengan adanya bantuan tersebut membuat para pelaku usaha sedikit terbantu untuk bertahan pada saat PPKM itu diberlakukan.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Aceh, akan segera merealisasikan bantuan stimulus ekonomi untuk pelaku UMKM berupa pemberian. Bantuan itu diberikan dalam rangka pemulihan dan pemberdayaan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Program tersebut akan sangat bermanfaat mengingat situasi pandemi Covid-19 yang juga memberi dampak besar pada sektor ekonomi. Total nilai bantuan ini sebesar Rp27,5 Milyar. Bagi para pelaku UMKM di Aceh yang ingin mendapatkan bantuan tersebut dapat segera mendaftarkannya mulai tanggal 12 sampai 27 Agustus 2021. Pendaftaran dapat diakses masyarakat pada situs [www.wpaceh.com](http://www.wpaceh.com). Pada laman website itu masyarakat dapat melihat informasi terkait pendaftaran, persyaratan, jadwal, tahapan wawancara dan pengumuman.

Sasaran utama program tersebut adalah wirausaha pemula dan pelaku usaha mikro, wirausaha pemula yaitu pencari kerja/PHK atau belum memiliki pekerjaan. Adapun persyaratan utamanya adalah memiliki KTP Aceh dan melampirkan proposal usaha.<sup>41</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa hambatan penerapan PPKM bagi para pelaku usaha adalah dari aspek kendala dapat dilihat bahwa kendala yang dirasakan oleh kedua pelaku usaha yaitu harus menutupnya tempat usaha mereka dan menurunnya jumlah pengunjung.

---

<sup>41</sup> <https://humas.acehprov.go.id/pemerintah-aceh-berikan-stimulus-bantuan-modal-untuk-umkm-berikut-cara-pendaftarannya/>

Strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan tetap membuka tetapi melakukan *take away* dan menggunakan media social untuk mempromosi tempat usahanya. Selanjutnya dari aspek keuangan hambatan yang dirasakan oleh pelaku usaha adalah menurunnya pendapatan dari usahanya. Dari aspek tenaga kerja yaitu para pelaku usaha melakukan PHK terhadap karwayanya dikarenakan usahanya harus ditutup sementara. Kemudian yang terakhir dari aspek intervensi pemerintah adalah pemerintah menyediakan dana bantuan bagi para pelaku usaha yang mengalami dampak dari penerapan kebijakan PPKM tersebut.

#### **4.3 Dampak Penerapan PPKM Terhadap Kondisi Pelaku Usaha Cafe Dikawasan Rekreasi Lhoknga Aceh Besar**

Hasil penelitian memberi gambaran terkait dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha cafe dikawasan rekreasi Lhoknga Aceh Besar pada saat pemberlakuan masa PPKM. Berdasarkan hasil analisis data wawancara yang telah dilakukan terlihat bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha cafe pada kategori sedang dan rendah mengalami hambatan dari segi pendapatan hasil usahanya. Keadaan ini memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian masyarakat.

Dampak yang dirasakan pada masa pemberlakuan PPKM oleh pelaku usaha cafe terhadap kondisi perekonomiannya sangat jelas. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh mereka selama ini harus dibatasi aktifitasnya dari kegiatan yang dapat mengundang kerumunan orang. Selain itu, pembatasan jam operasional dalam menjalankan usaha juga sangat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh

pelaku usaha. Keadaan ini memberikan dampak negatif terhadap perekonomian pelaku usaha.

Hasil wawancara dengan subjek Maha Corner terkait dampak yang dirasakan pada saat pemberlakuan kebijakan PPKM adalah sebagai berikut:

*“Pada saat PPKM jumlah pengunjung wisata pantai sangat berkurang, hal ini menyebabkan tempat usaha kami juga berkurang pengunjungnya. Kalaupun ada kadang-kadang kunjungan yang sedikit mengundang kerumunan, kami langsung ditegur oleh aparat keamanan.”<sup>42</sup>*

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa dampak pemberlakuan PPKM pada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sangat dipengaruhi oleh jumlahnya kunjungan para konsumen. Pengurangan kunjungan ini dikarenakan pemberlakuan pembatasan untuk menghindari kerumunan.

Lebih lanjut, subjek Maha Corner menjelaskan terkait penurunan pendapatan yang dialaminya yang sedikit tidaknya mengganggu perekonomiannya sebagai pelaku usaha. Berikut kutipan wawancara dengan subjek Maha Corner:

*“Walaupun kami menerapkan strategi take away terhadap makanan dan minuman yang jual, keadaannya tetap akan berbeda dengan sebelum PPKM. Dari segi pemasukan, kami jelas mengalami penurunan dibandingkan sebelum covid”<sup>43</sup>*

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Maha Corner pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

<sup>43</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Maha Corner pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

Dampak terhadap perekonomian yang dirasakan subjek Maha Corner yaitu menurunnya pendapatan. Dampak lainnya yang dirasakan dari sektor perekonomian yaitu terjadinya penurunan pendapatan para pelaku ekonomi.

Selanjutnya, kajian terhadap dampak yang dialami pelaku usaha pada masa pemberlakuan PPKM dikaji pada subjek Taman Tepi Laut. Berikut kutipan wawancara dengan subjek Taman Tepi Laut:

*“Pada saat PPKM pemasukan kami memang nol, karena usaha kami tutup. Kalau ada bantuan BLT dari desa, itulah yang kami untuk pakai untuk kebutuhan sehari-hari.”<sup>44</sup>*

Selanjutnya kutipan wawancara dengan subjek Cemara Cafe adalah sebagai berikut:

*“Dampak yang kami rasakan adalah tidak adanya pemasukan dari hasil usaha kami selama ini, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kami harus menggunakan tabungan serta bantuan BLT dari pemerintah desa.”<sup>45</sup>*

Subjek Adek Abang Cafe memberikan respon terhadap dampak yang dirasakannya selama penerapan kebijakan PPKM. Berikut respon melalui petikan wawancara dengan subjek Adek Abang Cafe:

*“Dampak yang kami rasakan langsung itu tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan yang diberikan pemerintahan sebagai modal usaha terpaksa harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain, seperti membeli kebutuhan makan dan lain-lain.”<sup>46</sup>*

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Pemilik Café Taman Tepi Laut pada hari dan tanggal : Minggu 4 Juni 2023

<sup>45</sup> Wawancara dengan pemilik Cemara Cafe pada hari dan tanggal : Minggu 13 Juli 2023

<sup>46</sup> Wawancara dengan pemilik Café Adek Abang pada hari dan tanggal : Minggu 13 Juli 2023

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, subjek Taman Tepi Laut, Cemara Cafe, dan Adek Abang Cafe merasakan dampak langsung terhadap perekonomiannya dimana pemasukan utamanya terhenti total. Subjek sama sekali tidak mendapatkan pemasukan selama pemberlakuan PPKM. Lebih lanjut, subjek menyatakan bahwa adanya bantuan yang diberikan dari desa dalam bentuk Bantuan Tunai Langsung (BLT). Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, subjek mempergunakan dana BLT yang disalurkan pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak yang terjadi akibat penerapan kebijakan PPKM oleh pemerintah pada sektor perekonomian masyarakat memberikan pengaruh penurunan pendapatan pada pelaku usaha cafe. Dampak Penghentian operasionalisasi dan penutupan tempat-tempat pariwisata karena kebijakan PPKM serta adanya penutupan akses transportasi membuat kunjungan ke fasilitas wisata anjlok drastis bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada.

Pukulan keras terhadap sektor pariwisata juga berimbas pada sektor pendukungnya seperti Dampak langsung seperti perhotelan, wisata kuliner, kerajinan dan ekonomi kreatif serta para pedagang kecil sebagai pekerja informal di sekitar daerah wisata. Para pedagang kecil, usaha mikro dan pekerja informal pendukung pariwisata yang berada di sekitar lokasi wisata sama sekali kehilangan pendapatan dan berhenti total. Padahal klaster masyarakat ini sangat rentan jatuh dalam kelompok masyarakat miskin.

Upaya pemerintah untuk melakukan PPKM merupakan strategi yang efektif untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus covid-19. Namun, hal ini harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan juga tetap mematuhi

protokol Kesehatan yang ada ketika berada di luar rumah. Langkah untuk melakukan PPKM dinilai lebih baik diterapkan di Indonesia jika dibandingkan dengan lockdown, karena dengan diadakannya lockdown maka masyarakat sama sekali tidak dapat beraktivitas di luar rumah.

Pemberlakuan kebijakan PPKM yang ditempuh pemerintah dalam upaya mencegah penularan virus Covid-19 berdampak positif dalam mengurangi dan memutuskan rantai penyebaran virus Covid-19 di Aceh. Secara umum kasus covid-19 terus mengalami penurunan selama PPKM dilaksanakan mencapai 24,41% penurunannya perharinya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa dampak PPKM terhadap perekonomian bagi para pelaku usaha cafe khususnya bagi kedua objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dampak PPKM yang sangat berdampak terhadap pelaku usaha adalah berkurangnya jumlah pengunjung dari hari-hari biasanya dimana hal tersebut juga berdampak pada pendapatan yang mana pendapatan juga ikut menurun. Dimana dengan berkurangnya pendapatan tersebut maka para pelaku usaha harus mengurangi jumlah karyawan di tempat usahanya.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian mengenai dampak PPKM terhadap perekonomian usaha cafe dikawasan rekreasi Lhoknga Aceh Besar maka dapat disimpulkan :

1. Dampak PPKM terhadap perekonomian bagi para pelaku usaha cafe khususnya bagi keempat objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dampak PPKM yang sangat berdampak terhadap pelaku usaha adalah berkurangnya jumlah pengunjung dari hari-hari biasanya dimana hal tersebut juga berdampak pada pendapatan yang mana pendapatan juga ikut menurun. Dimana dengan berkurangnya pendapatan tersebut maka para pelaku usaha harus mengurangi jumlah karyawan di tempat usahanya.

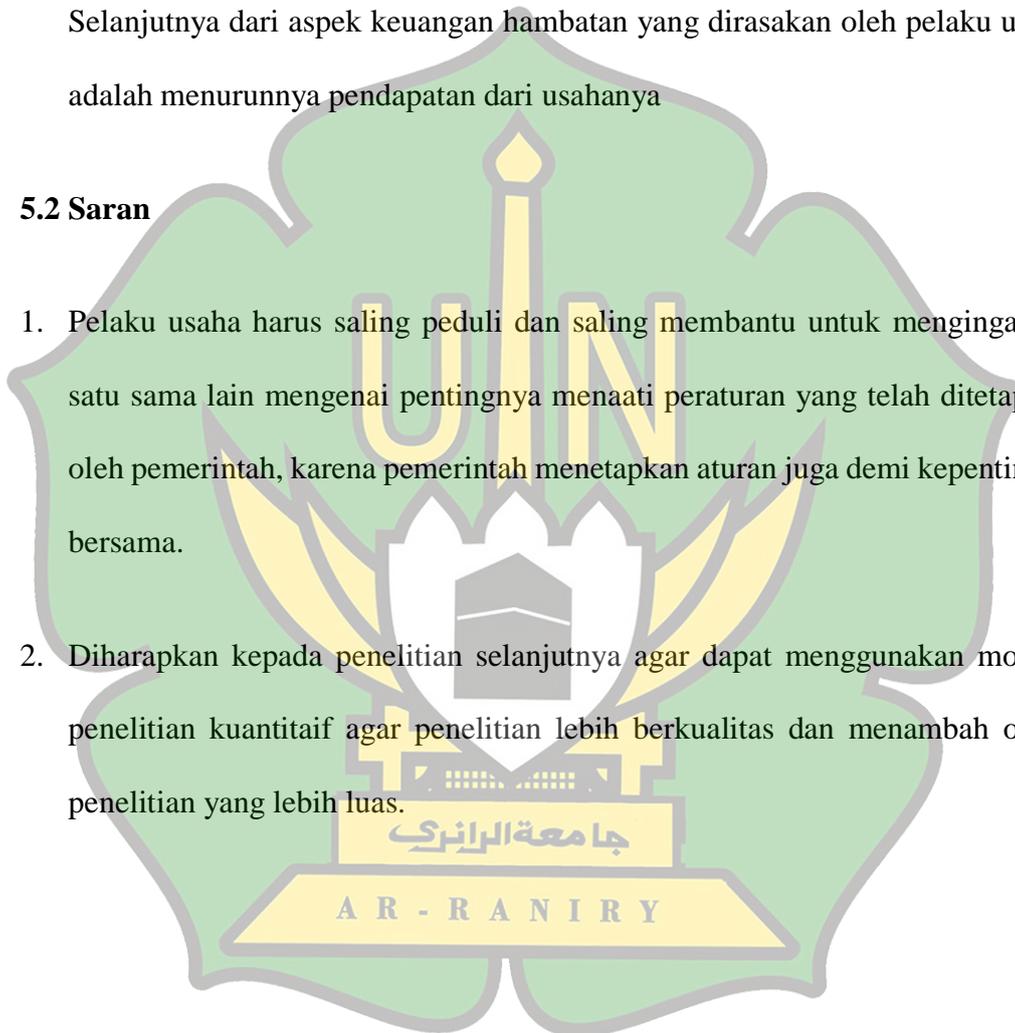
Dari aspek tenaga kerja yaitu para pelaku usaha melakukan PHK terhadap karwayanya dikarenakan usahanya harus ditutup sementara. Kemudian yang terakhir dari aspek intervensi pemerintah adalah pemerintah menyediakan dana bantuan bagi para pelaku usaha yang mengalami dampak dari penerapan kebijakan PPKM tersebut.

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa hambatan penerapan PPKM bagi para pelaku usaha adalah dari aspek kendala dapat dilihat bahwa kendala yang dirasakan oleh pelaku usaha cafe yaitu harus menutupnya tempat usaha mereka dan menurunnya jumlah

pengunjung. Strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan tetap membuka tetapi melakukan *take away* dan menggunakan media social untuk mempromosi tempat usahanya. Selanjutnya dari aspek keuangan hambatan yang dirasakan oleh pelaku usaha adalah menurunnya pendapatan dari usahanya

## 5.2 Saran

1. Pelaku usaha harus saling peduli dan saling membantu untuk mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah menetapkan aturan juga demi kepentingan bersama.
2. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan metode penelitian kuantitatif agar penelitian lebih berkualitas dan menambah objek penelitian yang lebih luas.



## DAFTAR PUSTAKA

Dr. Sahya Anggara, M.Si. *Kebijakan Publik*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2018), hal 24-27

<https://humas.acehprov.go.id/pemerintah-aceh-berikan-stimulus-bantuan-modal-untuk-umkm-berikut-cara-pendaftarannya/>. Di akses pada tanggal 15 juli 2023.

Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro level 4 bagi Kota Banda Aceh. hlm. 2.

Immanuela Tiffany Soumokil, V., & Umrotu, M. (2022). *Penurunan Pendapatan Akibat Covid-19 Terhadap Cafe-Cafe di Kilometer 10 Kota Sorong Pada Tahun 2021 (Studi pada Kilometer 10 Kota Sorong)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, <https://www.ekon.go.id>, (Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXXIV, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 248

Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.

Mawar, Dkk. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*

Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 13-15.

Napitu, U., Corry, C., & Matondang, K. D. (2021). Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Mikro Di Kelurahan Bah Kapul. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 232-241.

Nuraeny R., Dkk. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Pengaruh terhadap ketahanan Keluarga Pedangang di Kebumen. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2 (9), 1627-1639.

Partomo, T. S. (2004). Usaha kecil menengah dan Koperasi. *Fakultas Ekonomi. Universitas Trisakti. Jakarta.*

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik, 11(1)*, 1-12

Soendari, T. (2012). Metode Penelitian Deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, 17.*

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 118.

Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang:Widya Karya,h. 243.

Suhartana. G.M. (2016). Kajian Politik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial.* 2(2), 117-122.

Suwitri, S. (2022). Konsep dasar kebijakan publik.

Suhartana. G.M. (2016). Kajian Politik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial.* 2(2), 117-122.



## LAMPIRAN

### Draf Pertanyaan Wawancara

- **Kendala kegiatan usaha**

1. Ketika dilaksanakan PPKM apakah usaha bapak/ibu ada kendala?
2. Jika ada kendala apa saja yang bapak/ibu alami ketika PPKM diberlakukan?
3. Strategi apa saja yang bapak/ibu lakukan untuk bertahan dalam menjalankan usaha selama PPKM diberlakukan?

- **Aspek keuangan**

1. Bagaimana omset pada usaha bapak/ibu sebelum dan selama PPKM diberlakukan?

Apakah sangat kurang, kurang, cukup, sangat cukup?

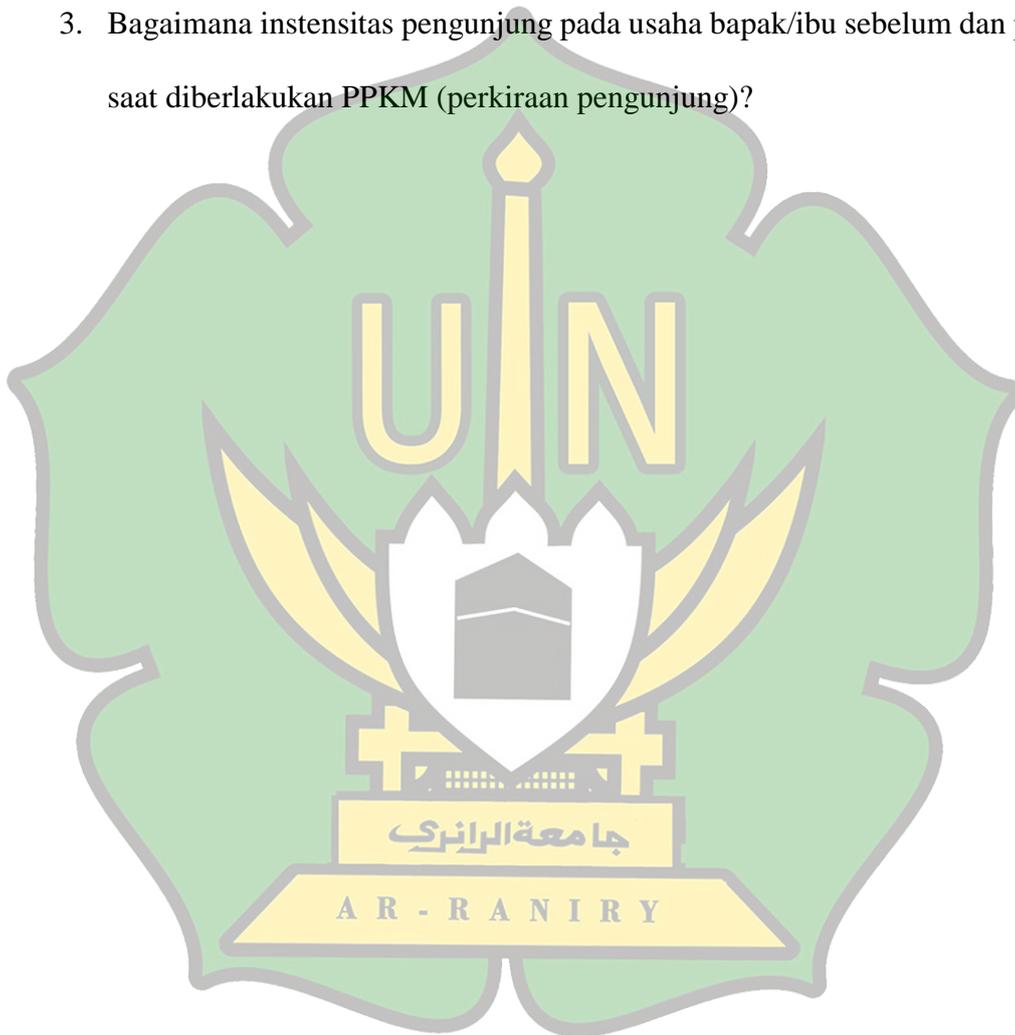
2. Apakah omset tersebut mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup selama PPKM?
3. Apakah penerapan PPKM mempengaruhi jam operasional bapak/ibu?

- **Aspek tenaga kerja**

1. Apakah ada perbedaan jumlah karyawan pada masa sebelum dan selama masa PPKM diterapkan?
2. Apakah terdapat karyawan yang dirumahkan pada saat masa PPKM diberlakukan?
3. Jika ada berapa orang dari jumlah seluruh karyawan semula?
4. Bagaimana pembayaran gaji pegawai pada masa PPKM, apakah ada penurunan gaji atau masih sama?

- **Aspek intervensi pemerintah**

1. Apakah ada bantuan dari pemerintah yang diberikan?
2. Apakah bapak/ibu ada meminjam modal usaha dari pihak tertentu
3. Bagaimana intensitas pengunjung pada usaha bapak/ibu sebelum dan pada saat diberlakukan PPKM (perkiraan pengunjung)?





Gambar 1. Wawancara dengan pemilik café adek abang



Gambar 2. Wawancara dengan manager maha corner



Gambar 3. Wawancara dengan pemilik cemara cafe



Gambar 4. Surat keterangan bimbingan

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ilham akbar
2. Tempat/Tanggal lahir : Banda Aceh, 10 April 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Lampuuk, Darussalam, Aceh Besar
6. Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Zulkifli
  - b. Nama Ibu : Dra. Yusna
  - c. Alamat : Lampuuk, Darussalam, Aceh Besar
7. Riwayat Pendidikan
  - a. MIN Tungkop, Aceh Besar, Tahun 2012
  - b. MTsN Rukoh, Banda Aceh, Tahun 2015
  - c. SMKN 1 Al Mubarkeya, Aceh Besar 2018

